

**IMPLEMENTASI MANAGEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL
KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)**

Tesis

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat
Penulisan Tesis Sebagai Tugas Akhir Perkuliahan Ilmu Ekonomi Islam**

Oleh

**ALI MUSTOFA
NPM:1660102032**

Jurusan : Ekonomi Islam



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI MANAGEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL
KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi Pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)

Pada hakikatnya kekayaan ialah milik Allah semata, namun Allah swt telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia, untuk diperdayakan dan dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup, salah satu bentuk ibadah kemasyarakatan dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam adalah wakaf. Tujuan dari wakaf itu sendiri adalah untuk kesejahteraan masyarakat, persoalannya sekarang adalah bagaimana mengarahkan wakaf agar tidak hanya dipahami sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, temporal, dan berupa tindakan yang bersifat kuratif, melainkan dapat didorong ke arah yang lebih luas dan lebih produktif serta dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Wakaf harus dikelola oleh *Nazir, Nazir* bisa bersifat perorangan maupun organisasi. Diantara wakaf ada yang dikelola oleh organisasi untuk dioptimalkan fungsinya, salah satunya adalah wakaf yang dikelola oleh Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana manajemen wakaf pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung dan Bagaimana dampak pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung terhadap kesejahteraan masyarakat perserikatan Muhammadiyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data yang diperoleh penulis dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan study pustaka. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*, hal ini bertujuan untuk mendapatkn sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dimana pada PWM Lampung saat ini terdapat 14 wilayah yang dikelola sedangkan peneliti menggunakan wilayah Bandar Lampung sebagai objek penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa manajemen wakaf pada PWM Lampung dilakukan dengan konsep pengoptimalisasian asset wakaf yaitu dengan adanya proses penghimpunan, pemeliharaan, dan pendayagunaan terhadap aset wakaf yang ada dengan menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang dan berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat perserikatan Muhammadiyah, meskipun dalam pengelolaanya telah berorientasi pada pengembangan asset wakaf, akan tetapi perwakafan pada PWM Lampung belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai wakaf produktif. Hal ini dikarenakan perwakafan yang ada masih berorientasi pada bentuk wakaf tidak bergerak saja. Wakaf yang dikelola oleh PWM Lampung banyak memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat perserikatan Muhammadiyah, akan tetapi peningkatan pendapatan tersebut belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perserikatan Muhammadiyah, meskipun terdapat peningkatan pendapatan, namun peningkatan pendapatan tersebut belum memenuhi standar kesejahteraan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Implementasi Managemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan
Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari
Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Lampung)

Nama Mahasiswa : Ali Mustofa

NPM : 1660102032

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian tertutup pada Program Pascasarjana (PPs)
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 17 Januari 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP:198008012003121001

Pembimbing II



Dr. Erike Anggraeni, M.E., Sy
NIP:1982080220110122009

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA.
NIP:19700926 200801 1 008

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul IMPLEMENTASI MANAGEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG)ditulis oleh ALI MUSTOFA, NPM 1660102032, telah diujikan dalam ujian tertutup dan disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,CA	(.....)
Penguji II	: Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.	(.....)

Tanggal Lulus Ujian Tertutup : 17 Januari 2019

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**IMPLEMENTASI MANAGEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG)**” ditulis oleh ALI MUSTOFA, NPM 1660102032, telah diujikan pada Ujian Terbuka pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I	(.....)
Penguji I	: Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,CA.	(.....)
Penguji II	: Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.	(.....)

**Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag.
NIP: 1960102 0198803 1 005

Tanggal Lulus Ujian Terbuka : 31 Desember 2019

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Ali Mustofa

NPM : 1660102032

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“IMPLEMENTASI MANAGEMEN WAKAF PADA LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDY PADA PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH LAMPUNG)”** adalah benar-benar karya Asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya .

Bandar Lampung 20 Desember 2019

ALI MUSTOFA

1660103032

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ

إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah:267).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirrabil'alamin

Sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai. Namun, itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari satu perjuangan. Kupersembahkan karya kecil ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi ku dan tak lekang oleh ruang dan waktu :

1. Orang tuaku tercinta Ayahanda “Warsidi ” dan Ibunda Muslikhah” yang selalu memanjatkan doa kepada putra mu tercinta dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya. Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu. Setulus hatimu Ibu, searif arahanmu Bapak, doamu hadirkan keridhaan untukku, petuahmu tuntunkan jalanku, pelukmu berkahi hidupku, diantara perjuangan dan tetesan doa malam mu dan sebaith doa telah merangkul diriku, menuju hari depan yang cerah. Kini diriku telah selesai dalam studi Magister dengan kerendahan hati yang tulus, bersama keridhaan-Mu ya Allah, Kupersembahkan karya tulis ini untuk yang termulia, Ayahanda dan Ibunda. Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini selalu bicara, sungguh ku mencintainya.

2. Ibu Suwarni sebagai pengganti ibu saya disaat saya jauh dari ibu kandungku, terima kasihku atas dukungan yang tiada hentinya kau berikan padaku.
3. Pamanku Prof. Dr. Hi. Moh. Mukri, M. Ag, yang telah banyak membantu dan memberi inspirasi untuk saya, engkaulah sang inspirator hidupku. Semoga ridha Tuhan selalu menyelimutimu.
4. Kakaku Brigadir Anton Sujarwo, Briptu Ali Hanafi, dan Achmad Ashari, S.E. yang tiada hentinya selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, engkaulah sang mentor untuk adik-adikmu. Semoga Tuhan membalas segala kebaikanmu.
5. Yang terkasih adikku Elisa Fitriana, yang juga masih menempuh pendidikan di UIN RIL, semoga engkau dapat menjadi wanita cantik yang akan membanggakan keluarga.
6. Bapak/Ibu dosen yang selama ini telah menuntunku ke jalan yang lurus, memberikan ilmunya kepadaku dengan penuh rasa tulus. Engkaulah sang pejuang sejati.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang menjadi kebanggaanku.
8. Saudara-saudara ku seperjuangan seluruh mahasiswa/i PPS UIN RIL jurusan Ekonomi Islam angkatan tahun 2016, yang telah berjuang bersamaku sampai detik ini, semoga kita dapat menjadi insan pengindah zaman, yang selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan selalu menjadikan Ridha Tuhan sebagai satu-satunya tujuan.
9. Dan semua yang tak bisa ku sebut satu per satu, yang pernah ada atau pun hanya singgah dalam hari-hariku, yang pasti kalian bermakna dalam hidupku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Sendang Retno Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 03 Maret 1994, putra kedua dari tiga bersaudara pasangan Ayahanda Warsidi dan Ibunda Muslikhah.

Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. SDN 01 Sendang Retno Lampung Tengah 2006
2. MTS dan Ponpes Al-Islah Sendang Retno Lampung Tengah 2009
3. MA dan Ponpes Al-Islah Sendang Retno Lampung Tengah 2012
4. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam dan menyelesaikan study pada tahun 2016
5. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan di pendidikan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Ekonomi Islam



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa melimpahkan rahmat-NYA sehingga tesis ini dapat terselesaikan, solawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya selalu kita nantikan sampai akhir zaman.

Penulisan dan penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan dan bantuan ketersediaannya fasilitas, tesis ini tidak akan tersusun sebagaimana mestinya. Untuk itu tidak berlebihan bila pada kesempatan ini penulis memberikan rasa hormat dan berterimakasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dapat belajar dan terus belajar serta tiada hentinya dalam bersyukur, dan rasa terimakasih saya ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto SE.,MM.,Act., CA selaku ketua Prodi Ekonomi Islam yang senantiasa memotifasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur Noor M.Si. selaku pembimbing I dan ibu Dr. Erike Anggraini selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing, mengarahkan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen, para Staff Karyawan Jurusan Ekonomi Islam

5. Pimpinan dan Karyawan perpustakaan PPS UIN RIL yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas jasa dan kebaikan pada semua pihak yang telah membantu serta mendoakan sampai terselesaikannya tesis ini.
Amin Yaa Robbal'alamin.

Bandar Lampung, Januari 2019

Ali Mustofa

1660102032



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Metode Penelitian	16
G. Pengelolaan dan Analisis Data	16
H. Tinjauan Pustaka.....	17
I. Kerangka Pemikiran	22
J. Metode Penelitian	25
K. Pengelolaan dan Analisis Data	31

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Managemen	33
1. Definisi Managemen.....	33
2. Fungsi Managemen.....	36
B. Wakaf.....	40
1. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukum Wakaf	40
2. Dasar Hukum Wakaf.....	43
3. Rukun dan Syarat Wakaf	47

4. Hikmah Diisyaratkannya Wakaf	52
5. Macam-Macam Wakaf di Indonesia	53
C. Konsep Manajemen Wakaf	55
1. Pengertian dan fungsi manajemen wakaf.....	55
2. Macam-Macam Wakaf Produktif.....	73
3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif.....	77
4. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif	77
5. Program Pengelolaan Wakaf Produktif.....	79
6. Wakaf Sebagai Pranata Ekonomi Islam	80
D. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	81
1. Pengelolaan Tanah Menurut Hukum Islam	81
2. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif	83
E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	84
1. Pengertian Kesejahteraan.....	84
2. Indikator Kesejahteraan menurut BPS.....	88
3. Kesejahteraan dalam Islam	92
4. Perhatian Islam terhadap Penanggulangan Kemiskinan	100

BAB III : LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Muhammadiyah Dalam Lintas Sejarah.....	110
B. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung	118
C. Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Lampung	124
D. Implikasi Wakaf pada PWM Lampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	135

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Implementasi Manajemen wakaf pada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung.....	153
B. Implikasi Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung terhadap Kesejahteraan Masyarakat	164

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	175
B. Saran	176

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aset Tanah Wakaf Di 14 Kabupaten Kota.....	11
Tabel 2 Aset Wakaf Lembaga Pendidikan di 14 Kabupaten Kota.....	11
Tabel 3 Aset Wakaf berupa lembaga pendidikan.....	125
Tabel 4 Pola Konsumsi Masyarakat Bandar Lampung	125
Tabel 5 Tingkat Perumahan Warga Bandar Lampung	129
Tabel 6 Indikator Kesejahteraan Bapak Dodi	137
Tabel 7 Indikator Kesejahteraan Nartoyo	137
Tabel 8 Indikator Kesejahteraan Bapak Andre	138
Tabel 9 Indikator Kesejahteraan Bapak Ikhsanto	138
Tabel 10 Indikator Kesejahteraan Bapak Jamaluddin.....	139
Tabel 11 Indikator Kesejahteraan Bapak Efendi Adam	139
Tabel 12 Indikator Kesejahteraan Bapak Muslimin.....	139
Tabel 13 Indikator Kesejahteraan Bapak Arifin	140
Tabel 14 Indikator Kesejahteraan Bapak Supiyono Edi	141
Tabel 15 Indikator Kesejahteraan Iswardiman	141
Tabel 16 Indikator Kesejahteraan Elfandiyas	142
Tabel 17 Indikator Kesejahteraan Bapak Suleman Juli	145
Tabel 18 Indikator Kesejahteraan Edi Purwanto	145
Tabel 1 Indikator Kesejahteraan Bapak Hadi	146

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari proposal ini, maka perlu kiranya dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah yang terkait dengan judul tersebut. Adapun judul ini adalah: **“Implementasi Manajemen Wakaf Pada Lembaga Sosial Keagamaan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)”**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi

Adalah Suatu kegiatan yang berpijak pada aktifitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme dalam suatu sistem yang terencana, dilakukan untuk menerapkan sistem yang diperoleh dari sebuah kegiatan.¹

2. Manajemen

Adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan²

¹Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1999, h. 197

² Dian Wijayano, *Pengantar Manajemen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 2

3. Wakaf

Adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, kemudian menjadikan manfaat berlaku secara umum.³

4. Lembaga sosial keagamaan

Adalah Suatu himpunan norma dan keagamaan yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam kehidupan bermasyarakat⁴

5. Implikasi

Adalah suatu akibat langsung ataupun konsekuensi dari suatu hal.⁵

6. Kesejahteraan

Adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah, dan sosial yang sebaik baiknya bagi dirinya, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.⁶

³Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Paradigma baru wakaf di indonesia*, Jakarta, 2007, h. 1

⁴Bagja Waluya, *Sosilogi Menyelami Fenomina Sosial Di Masyarakat*, Jakarta, 2012, h.33

⁵Agus Sulistyono dan Adi Mulyono, *Kamus bahasa indonesia*, ITA Surakarta. Jakarta, 2007, h. 222

⁶Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010, h. 309

7. Masyarakat

Adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, secara hukum masyarakat adalah menurut hukumnya sendiri, masyarakat yang memiliki mata pencaharian dalam *sector* perdagangan dan industri atau yang bekerja di sector administrasi pemerintah.

8. Ekonomi Islam

Adalah Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi, yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam ⁷

Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu aktifitas ataupun tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga sosial keagamaan yang dalam hal ini penulis khususkan pada salah satu lembaga sosial keagamaan yang berada di provinsi Lampung yaitu lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, dalam mengelola wakaf sehingga dapat lebih berdayaguna dan berakibat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya fenomena dimana wakaf hanyalah dipandang sebagai kegiatan pemberian yang dilaksanakan berdasarkan kemurahan dan berupa tindakan yang bersifat kuratif, sehingga wakaf menjadi kurang

⁷Musthafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana , 2007), h. 5.

berkembang dan berdayaguna. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana instrumen wakaf dapat didorong kearah yang lebih luas dan lebih produktif serta dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga bisa berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Dari aspek yang akan dibahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan diadakan penelitian dan penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang pengelolaan wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, mengingat literatur dan sumber informasi dalam penulisan ini cukup tersedia.
3. Kajian ini sesuai dengan disiplin ilmu penulis yaitu ekonomi Islam serta didukung oleh lokasi penelitian yang terjangkau sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

C. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya kekayaan adalah milik Allah Swt, namun Allah Swt telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia, untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagaimana firman Allah dalam Al Qur`an surat Adz-Zariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S. Adz-Zariyaat:56).

Pelaksanaan ibadah diwujudkan melalui pengabdian diri kepada Allah Swt, ada ibadah yang dilakukan dengan pengabdian badan seperti: sholat, puasa atau juga bentuk pengabdian berupa pengorbanan harta benda seperti: Zakat, infak dan shadaqoh. Salah satu bentuk ibadah melalui pengorbanan dengan harta benda yang kita miliki untuk kepentingan kemanusiaan, kemasyarakatan, dan keagamaan yang telah diatur oleh syariat Islam ialah wakaf.

Wakaf dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara menahan pokoknya dan mendermakan hasil atau manfaatnya kepada masyarakat. yang dimaksud menahan pokok ialah menahan barang yang diwakafkan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah, waris, dan sebagainya. Sedangkan cara pemanfaatannya diorientasikan pada sektor-sektor kebajikan sesuai dengan kehendak pewakaf yang tertuang dalam ikrarnya.⁸ Hal ini sesuai dengan konsep kepemilikan harta dalam Islam, yang menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan hanya dikuasai oleh seorang atau sekelompok orang saja, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya (Qs. Ali Imron :92).⁹

⁸Tutu A. Najib dan Ridwan Al Makasarry, *Wakaf Tunai dan Agenda Kemanusiaan Study Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, Center For The Study Of Religion And Culture, Jakarta, 2006, h. 123-124

⁹Departemen Agama, h.49

Eksistensi lembaga wakaf bisa dikatakan sangatlah urgen dan strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual wakaf juga merupakan ajaran Islam yang menekankan akan pentingnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁰ Wakaf dalam kaitanya dengan masalah sosial ekonomi harus dikelola secara produktif sehingga berujung pada kontribusi solutif terhadap perekonomian masyarakat dan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.¹¹

Masalah ekonomi yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama setelah krisis moneter yang berdampak pada krisis multi dimensional yang berujung pada terjadinya disparitas nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan dampaknya masih terasa hingga sekarang. Menurut catatan Harry Hikmat penduduk miskin di Indonesia jumlahnya pada bulan Agustus 2008 mencapai 39,1% atau 79,4 juta orang,¹² hal ini menunjukkan betapa banyaknya masyarakat Indonesia yang hidup jauh dari tingkat kesejahteraan. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi antara lain dengan hasil wakaf sebagai institusi sosial yang sangat strategis.

Sejarah membuktikan bahwa wakaf telah berperan memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan sosial seperti pembangunan tempat sekolah, pembuatan karya tulis, pengadaan air bersih, dan pemenuhan kebutuhan fakir miskin. Dimana pada masa bani Umayyah dan bani Abbasiyah peranan wakaf tidaklah hanya terbatas pada pembangunan tempat-tempat ibadah dan juga pendidikan tetapi

¹⁰M. Atthoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung, 2014, h. 13

¹¹Direktorat Pemberdaya Wakaf Dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2009, h. 17

¹²R. Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama, Bandung, 2010, h. 122-123

menjangkau pada penyediaan biaya oprasional majelis ilmu, pendidikan, beasiswa, kesejahteraan guru, serta tenaga kependidikan lainnya.¹³ Dan bahkan di era modern saat ini wakaf sudah mulai diterapkan diberbagai negara, seperti di Mesir, Arab Saudi, Turki,Bangladesh, Malaysia, pengelolaanyapun dilakukan dengan perinsip-prinsip syariah sehingga berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti di Bangladesh misalnya,wakaf uang dan juga wakaf tanah menjadi sarana pendukung kesejahteraan masyarakat, di Bangladesh harta wakaf dikelola kantor Administrasi Wakaf dan yayasan/komite wakaf yang tidak terdaftar pada kantor administrasi juga bekerja sama dengan *Sosial Invesment Bank Ltd* (SIBL), untuk mengembangkan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti:surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, dan lain-lain.¹⁴ Di negara ini terdapat 8.317 lembaga pendidikan Islam,123.000 masjid, 55.584 lapangan untuk sholat idul fitri, 21.163 lahan pemakaman, dan 3.859 lembaga sosial lainnya yang statusnya adalah harta wakaf.¹⁵ Sehingga wakaf di Bangladesh memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat. Begitupun perwakafan di kuwait, jumlah wakaf semenjak tahun 2000an mencapai 42 juta dinar Kuwait. Wakaf di Kuwait digunakan untuk pelayanan publik, mengembangkan ekonomi masyarakat khususnya di daerah yang kurang maju. Penggunaan dana wakaf digunakan untuk memenuhi dan memperbaiki peranan

¹³Abdul Ghofur Anshori,*Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*,Pilar Media, Yogyakarta, h. 16

¹⁴Achmad Djunaidi dan Thobie al-Asyhar,*Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing, Jakarta,2007*, h.42

¹⁵Laporan Hasil Aplikasi Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Perumahan Swadaya,PT Adhiza Maraton di Kementrian Negara Perumahan Rakyat, Jakarta,2007,h.47

pengembangan wakaf, membentuk satuan model kerja, dan memanfaatkannya untuk semua perwujudan organisasi yang efektif, efisien, dan ketat sehingga berujung pada peningkatan perekonomian masyarakat.¹⁶

Uraian diatas menunjukkan betapa besar peran wakaf yang dapat disumbangkan untuk kepentingan masyarakat baik dalam memfasilitasi kegiatan keagamaan, ekonomi maupun kegiatan-kegiatan akademik. Akan tetapi di Indonesia faktanya lain, dimana perwakafan saat ini menghadapi masalah yang cukup kompleks, karena umumnya merupakan wakaf non produktif.¹⁷ Dimana biaya oprasionalnya terkesan membebani masyarakat. Problem lain yang tidak kalah penting adalah banyak lahan-lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan yang kering yang tidak produktif karena tidak bisa dimanfaatkan oleh Nazhir, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture*(CSRC)terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di indonesia menunjukkan bahwa, mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan musholah adalah 79%,untuk lembaga pendidikan adalah 55%, dan tanah perkuburan 9%, dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan masjid ternyata pemanfaatanya tidak menghabiskan seluruh lahan. Sebenarnya tanah kosong yang ada dipekarangan masjid masih bisa dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbsis masjid.¹⁸

¹⁶Abdul Mohsen dan M.Ali Othman,*Role of kuwait Awqaf*, h. 253

¹⁷Hasil penelitian imam suhaidi tahun 1987 menunjukan bahwa keadaan wakaf dalam skala nasional sebagian besar adalah wakaf non produktif ,digunakan untuk sarana peribadatan dan makam 82,63%,madrasah dan sekolah 6,39%, sarana sosial lain 10,97%, Lihat Imam Suhaidi ,*Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta,2002,h.65-66.

¹⁸Tutu A Najib dan Ridwan Al Makassary,*Wakaf Tunai dan Agenda Kemanusiaan Study Tentang Wakaf Dalam prspektif Keadilan Sosial di Indonesia*,Center for the study of religion and culture, Jakarta, 2006,h. 123-124

Berdasarkan data Kementrian Agama Republik Indonesia, luas tanah wakaf pada tahun 2012 mencapai angka 3.492.045.373,754 m² yang tersebar di 420.003 lokasi di wilayah Indonesia.¹⁹ Seharusnya lahan yang begitu luas tersebut dapat membawa pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ketika dikelola dengan produktif. Namun kenyataannya tanah wakaf tersebut belum digarap secara optimal, bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat, selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif, berdasarkan penelitian yang dilakukan *Center for the Study of Religion and Culture*(CSRC) tentang harta wakaf yang dimanfaatkan secara produktif, di Indonesia terdapat 23% dengan rincian 19% berbentuk lahan sawah/kebun, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3%, dan 1% berbentuk peternakan ikan.²⁰ Padahal jika dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan secara produktif maka hasilnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan undang –undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan juga PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004. Hal ini dilakukan karena selama ini tradisi masyarakat Indonesia khususnya dipedesaan dalam pengelolaan wakaf masih mengacu pada praktik wakaf

¹⁹Tim Peneliti Pendataan/ Laporan Tanah Wakaf Produktif dan Strategis Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Data Tanah Wakaf Produktif di Seluruh Indonesia, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

²⁰Tutu A. Najib dan Ridwan Al Makasarry, *Op. Cit*, h. 133

konsumtif, sebagai bukti dapat dikemukakan bahwa aset wakaf di masyarakat hingga saat ini umumnya berupa tanah dan bangunan yang secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat (konsumtif), bukanlah berupa komoditas yang dapat dikembangkan dan dikelola secara produktif sehingga berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Persoalanya sekarang adalah bagaimana mengarahkan wakaf agar tidak hanya dipahami sebagai sebuah pemberian yang dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan, temporal, dan berupa tindakan yang bersifat kuratif, melainkan dapat didorong kearah yang lebih luas dan lebih produktif serta dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini ingin melihat salah satu lembaga sosial keagamaan yang dieksplorasi dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkembang dan dapat membiayai proyek-proyek keagamaan serta menjadi salah satu instrumen kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu majlis wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung. Mengingat besarnya minat masyarakat untuk berwakaf di PWM Lampung hingga hari ini maka perlulah dilakukan pengelolaan wakaf secara profesional, hal ini disebabkan karena maju mundurnya pengelolaan harta wakaf sangat tergantung pada bagaimana pengelolaanya, oleh karena itu demi tertib organisasi yang berkarakter efektif dan profesional maka PWM Lampung telah menyusun sebuah program kerja untuk lebih mengefesiensikan pengelolaan harta benda wakaf tersebut. Adapun program kerja majlis wakaf dan kehartabendaa pada PWM Lampung ialah dimulai dari

penerbitan asset wakaf, penyelesaian asset tanah yang bermasalah dan juga pengembangan asset. Disamping tiga program utama tersebut PWM Lampung juga memiliki beberapa program pemberdayaan asset wakaf yang dirasa cukup modern yaitu berupa pengembangan dan pengamanan harta wakaf serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf.

Adapun Jumlah Aset Tanah Wakaf yang masuk pada pelaporan Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 1 Aset Tanah Wakaf Di 14 Kabupaten Kota

No.	Kota Se Provinsi Lampung	Luas Tanah Wakaf (m2)
1	Bandar Lampung	77.965.13
2	Metro	153.327
3	Lampung Selatan	157.852
4	Lampung Tengah	390.932
5	Lampung Utara	38.867
6	Lampung Timur	72.232
7	Lampung Barat	5.001
8	Pringsewu	*
9	Tanggamus	220.616.07
10	Pesawaran	*
11	Way Kanan	121.925
12	Mesuji	*
13	Tulang Bawang	112.663
14	Tulang Bawang Barat	*
	TOTAL	2.053.070.2

(Sumber: Laporan Data PWM Bandar Lampung)²¹

Tabel 2 Aset Wakaf Lembaga Pendidikan di 14 Kabupaten Kota

No.	Kota Se Provinsi Lampung	SD/MI,SMP/SMA/SMK/PT	Jumlah Satuan
1	Bandar Lampung	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT (UML : 4 Fakultas dan S2	3 6 5 1
2	Metro	1.SD 2.SMP 3. SMA	1 5 9

²¹ Sumber Rekapitulasi Luas Tanah Milik PWM Lampung berdasarkan Daerah atau Kota

		4. PT (UMM : 4 Fakultas	1
3	Lampung Selatan	1.SD 2.SMP 3. SMA	1 15 10
4	Lampung Tengah	1.SD 2.SMP 3. SMA	6 21 21
5	Lampung Utara	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT (STKIP . STIH .STIE	1 6 3 3
6	Lampung Timur	1.SD 2.SMP 3. SMA	7 27 16
7	Lampung Barat	1.SD 2.SMP 3. SMA	2 3 2
8	Pringsewu	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT (STKIP, THIE, STIH, AKPER	4 7 3 4
9	Tanggamus	1.SD 2.SMP 3. SMA	7 15 5
10	Pesawaran	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT (UML)	4 3 4
11	Waykanan	1.SD 2.SMP 3. SMA	- 3 3
12	Mesuji	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT (UML	- - - -
13	Tulang Bawang	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT (UML	1 6 8 -
14	Tulang Bawang Barat	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT	3 5 5 -

	Jumlah	1.SD 2.SMP 3. SMA 4. PT dan Univ	44 118 94 9
--	---------------	---	--

(Sumber: Laporan Data PWM Bandar Lampung)²²

. Dari keseluruhan tanah wakaf yang ada hampir keseluruhanya memberikan kontribusi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti tanah wakaf yang terdapat di Pringsewu misalnya, yang berupa persawahan yang dikelola oleh bapak Sugimin, lahan tersebut dikelola dan hasilnya dibagi dua dengan lembaga majlis wakaf PWM dengan sistem bagi hasil, dengan mengelola sawah tersebut maka bapak Sugimin mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga dengan adanya tanah persawahan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat muhammadiyah mengalami peningkatan, sehingga masyarakat tidak mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.²³ Bpk Budi, Triyono dan ibu Sugesti yang bekerja sebagai petani mengaku pendapatan yang diperoleh tiap bulanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi karena adanya tanah wakaf yang kini telah didirikan ruko-ruko yang dapat digunakan untuk berdagang sehingga memperoleh pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan.²⁴ Ada juga tanah wakaf yang dibangun menjadi universitas pendidikan seperti di Pringsewu misalnya sehingga dengan demikian akan memudahkan akses masyarakat untuk melanjutkan jenjang pendidikan.

²² Sumber Rekapitulasi Jumlah Sekolah Dan Perguruan Tinggi Dari Dikdasmen Dikti PWM Lampung Berdasarkan Daerah Atau Kabupaten Kota

²³ Wawancara pada Bpk Sugimin Tgl 15 Agustus 2018

²⁴ Wawancara Tgl 15 Agustus 2018

Majlis Wakaf pada PWM Lampung berusaha menghimpun wakaf yang berasal dari masyarakat dan kemudian hasil wakaf tersebut diorientasikan pada hal-hal produktif yang dapat berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat muhammadiyah. Kenyataan adanya upaya pengelolaan wakaf pada lembaga sosial keagamaan tersebut menunjukkan bahwa peran wakaf menjadi semakin penting karena wakaf dikelola dan diperdayakan sehingga mampu membiayai proyek-proyek keagamaan dan ekonomi yang berkelanjutan. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pengelolaan yang dilakukan dan sejauh mana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat, untuk mengungkap bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan wakaf di PWM Lampung serta sejauh mana implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat maka perlu kiranya untuk dilakukan sebuah penelitian.

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, bahwa untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset wakaf maka perlu dilakukannya manajemen wakaf dengan optimal, salah satunya adalah dengan adanya pengelolaan melalui lembaga sosial keagamaan yang dalam penelitian ini penulis khususkan pada Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung. Dan permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan wakaf saat ini adalah lembaga pengelola wakaf (Nazhir) belum dapat mengelola secara optimal aset wakaf yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit lembaga-lembaga keagamaan dan yayasan yang mengelola wakaf berupa tempat pendidikan dan peribadatan yang terlantar,

hal ini disebabkan karena pihak wakif pada umumnya hanya mewakafkan tanah atau bangunan dan menyerahkan pada nadzir tanpa memikirkan biaya operasionalnya. Selain itu sistem pengelolaan yang tidak dilandasi dengan kerangka kerja profesional menjadi penyebab institusi pengelola wakaf tidak berkembang (statis) dan tidak dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan tujuan wakaf. Oleh karena hal tersebut maka dalam hal ini penulis memfokuskan pengkajian masalah kepada :

1. Minimnya sosialisasi kepada Nazhir terkait pengelolaan dan pendayagunaan aset wakaf agar dapat lebih berdayaguna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Belum adanya program-program yang efektif terhadap pendayagunaan wakaf secara luas.
3. Lemahnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam mewakafkan aset wakaf pada Nazhir.

E. Batasan Masalah

Guna mendapatkan hasil yang lebih fokus pada permasalahan serta mencapai sasaran yang diinginkan, maka perlu untuk dilakukan pembatasan terhadap masalah yang ingin diteliti, mengingat sangat luasnya masalah dalam tema tersebut, maka dalam hal ini penulis mencoba mengarahkan persoalan hanya pada bagaimana manajemen Wakaf pada lembaga sosial keagamaan PWM Lampung yaitu berupa program kerja majlis wakaf dan kehartabendaa pada PWM Lampung dimulai dari pengembangan asset wakaf, pengamanan harta wakaf serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf. Sehingga berdampak

terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan warga persyarikatan Muhammadiyah.

F. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen wakaf pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung ?
2. Bagaimana dampak pengelolaan wakaf pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat perserikatan Muhammadiyah ?

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. untuk mengetahui pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh majlis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, sehingga terjadi kelestarian terhadap manfaat wakaf.
- b. untuk mengetahui dampak atas wakaf yang dikelola oleh lembaga Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dan mengembangkan kajian di bidang perwakafan dan sekaligus dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang perwakafan.
- b. Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga kepada lembaga pengelola wakaf, agar dapat memelihara dan mendayagunakan wakaf untuk lebih produktif dan dapat menjadi kontribusi solutif terhadap perekonomian masyarakat.
- c. Mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai penerapan wakaf dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

H. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai wakaf telah banyak dilakukan penelitian sebelumnya, diantaranya ialah: *Pertama* pada tahun 2015, M. Mukhlisin Muzarie menyatakan bahwa perspektif baru yang dikembangkan telah memastikan bahwa praktik dari wakaf oleh instruktur wakaf memenuhi standar syariah. Kelebihan dalam penelitian ini adalah penelitian Mukhlisin Muzaie mengusulkan sebuah panduan dan menghasilkan beberapa rekomendasi untuk membantu manajer lembaga wakaf dalam pengambilan keputusan dan strategi perumusan, khususnya dengan terformulasinya hukum hukum atas benda wakaf yang selalu berkembang dari masa ke masa, hingga meliputi

semua benda yang bernilai ekonomi.²⁵ Kekurangan dalam penelitian ini adalah tidak terpaparkannya konsep pengelolaan wakaf yang efektif, khususnya terkait bagaimana Nazhir selaku pengelola wakaf dapat lebih mendayagunakan aset wakaf .

Kedua adalah Penelitian yang dilakukan oleh M Nur Rianto Al Arif pada tahun 2015 kelebihan dalam penelitian ini adalah wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU). Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%). Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi

²⁵Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* , Kementrian Agama, Jakarta, 2015, h. 10

suatu komunitas. Demikian besarnya manfaat wakaf uang bagi pemberdayaan masyarakat, perlu didorong suatu kesadaran masyarakat agar mampu berperan serta aktif dalam gerakan wakaf uang ini. Potensi dana yang cukup besar dari wakaf uang akan mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi pembangunan umat dan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Kekurangan dalam penelitian tersebut adalah belum terumuskannya manajemen wakaf yang optimal dalam pendayagunaan aset wakaf tunai tersebut.

Ketiga adalah penelitian ini dilakukan oleh Syamsul Hilal. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Kepercayaan masyarakat timbul sebagai akibat penerapan sistem manajemen akuntabilitas publik. Kelebihan dalam penelitian ini dimana dapat menjelaskan Indikator penguatan kelembagaan dan kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari kenaikan aset wakaf yang dikelola, dan bertambahnya jumlah dan segmen, Kekurangan dalam penelitian ini dimana, penulis tidak memformulasikan secara jelas bagaimana peran BWI selaku lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap Nazhir sehingga wakaf dapat dikelola ke arah yang lebih berdaya guna terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.²⁷

Keempat adalah Penelitian yang dilakukan oleh Asmak Ab Raham. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan mengenai masalah kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Kelebihan dalam penelitian ini dimana dapat membandingkan konsep wakaf di

²⁶. M Nur Rianto Al Arif, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*, Jurnal AsySyir'ah FakSyariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 44, No. II tahun 2015

²⁷ Syamsul Hilal, *Wakaf dalam persyarikatan Muhammadiyah* Program IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, 2013.

Indonesia dan Malaysia, dimana Malaysia dengan tingkat populasi lebih kecil dari Indonesia dan pendapatan pemerintah yang besar, pengelolaan wakaf banyak dilakukan dalam bentuk wakaf tunai, dapat mengatasi masalah kemiskinan di Malaysia. Kekurangan dalam penelitian ini, dimana potensi wakaf Indonesia sangat besar apabila masyarakat dan kerjasama antar pemangku kepentingan dan peraturan pemerintah merupakan solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.²⁸

Kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, Yosi Mardon. Penelitian ini menjelaskan Privatisasi beberapa lembaga pengelolaan wakaf di Malaysia telah membuka fase baru dalam administrasi wakaf dengan Tujuan peningkatan citra kelembagaan, terutama melalui pengenalan dan implementasi nilai-nilai perusahaan. Berbagai kegiatan dan upaya promosi dilakukan untuk mencapai tujuan ini yang menimbulkan signifikan pengeluaran yang akan sia-sia jika gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Kelebihan dalam penelitian ini dimana dilakukan mengidentifikasi faktor-faktor yang membentuk dan menentukan citra lembaga wakaf di antara kontributor wakaf dan nonkontraktor. Berdasarkan dua komponen dasar corporate image yang terdiri dari emosional dan fungsional komponen, empat faktor diajukan - reputasi, komunikasi perusahaan, akses terhadap layanan. Penemuan-penemuan ini telah memperluas pemahaman akan konsep

²⁸ Asmak Ab Raham, *peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat islam dan aplikasinya di Malaysia*, Shariah Journal . Vol. 17, No. 1 (2016)
 , IAIN Syekh Nurjati Cirebon (Lembaga Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), Tinjauan Ekonomi Turki, Vol. 3, No. 3

citra dan antesedennya dalam konteks lembaga wakaf di Malaysia. Kekurangan dalam penelitian ini masih kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai lembaga wakaf. Sehingga menimbulkan pemikiran lembaga wakaf tidak transparan, tidak amanah, tidak profesional dan citra negatif lain-lain.²⁹

Berdasarkan penelitian yang telah di paparkan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis kaji saat ini. Persamaanya yaitu terdapat pada objek penelitian mengenai wakaf, khususnya sub tema mengenai manajemen wakaf yang dikelola oleh suatu lembaga, Sedangkan perbedaan tema yang penulis teliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya ialah , penulis disini selain mengkaji tentang manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan, penulis juga akan mengkaji lebih dalam tentang implikasi atas pengelolaan wakaf itu sendiri “Implementasi manajemen wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apakah wakaf berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Lembaga sosial keagamaan sebagai salah satu pengelola wakaf, pengelolaan wakaf sudah tidak lagi bermasalah dan mampu menjadikan wakaf sebagai solusi permasalahan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Selain itu, penulis juga ingin memperdalam pengkajian terhadap alur pengelolaan, pemeliharaan dan pendayagunaan aset wakaf oleh lembaga sosial keagamaan beserta program-program yang dicanangkannya. Dan

²⁹Nurul Huda, Desti Anggraini, Nova Rini, Khamim Hudori, Yosi Mardoni, *Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf*, Jurnal Masyarakat dan Ruang Vol. 5 edisi 3 Tahun 2016.

sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat persyarikatan Muhammadiyah.

I. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan wakaf di Lembaga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung dimulai sejak berdirinya lembaga tersebut.³⁰ Hal ini didasarkan atas adanya benda-benda wakaf yang hingga kini dapat disaksikan ditempat kelahiran perserikatan ini. Dari pendirian perserikatan berupa masjid dan beberapa gedung sekolah di Lampung. Adapun regulasi perwakafan mengacu kepada hukum Islam dan dilengkapi dengan hukum positif. Lembaga Pimpinan Muhammadiyah Lampung bertindak sebagai Nadzhir dimulai sejak diakuinya berdirinya PWM itu sendiri. Yang mana tata cara wakaf di lingkungan perserikatan Muhammadiyah adalah mengikuti petunjuk dan arahan dari Majelis wakaf dan kehartaabendaan PP Muhammadiyah. Adapun petunjuk teknisnya adalah diterbitkannya buku pedoman yang beberapa bagian isinya menjadi bahan kutipan pada sub bab penelitian ini.

Sistem pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Lembaga PWM Lampung dibagi menjadi tiga kategori antara lain: penghimpunan Wakaf, Pemeliharaan wakaf dan pendayagunaan Wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan warga persyarikatan Muhammadiyah. Salah satu proses pengelolaan Wakaf yang Paling penting adalah proses pengelolaan dan pendayagunaan terhadap harta benda wakaf yang harus dilakukan secara

³⁰ Zafrullah Salim dkk, Panduan Waakaf (Jakarta: Majelis Wakaf dan ZIS Muhammadiyah, 2010), h. 9

efektif dan optimal, agar tujuan wakaf benar-benar dapat berdayaguna dan berujung pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

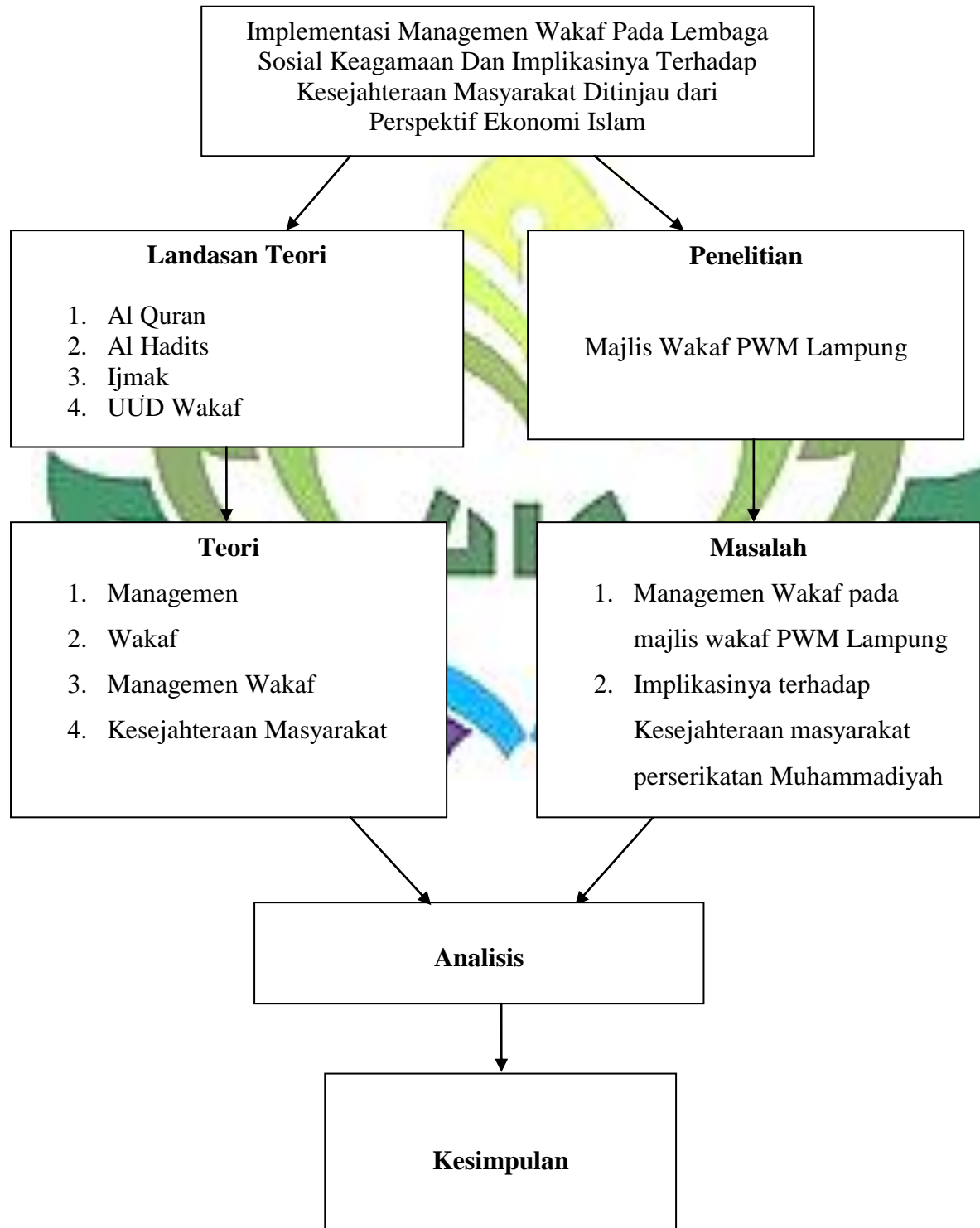
Proses penghimpunan, pemeliharaan, dan pendayagunaan terhadap aset wakaf pada Lembaga PWM Lampung dilakukan sesuai dasar hukum wakaf, hal ini terlihat dari pemanfaatan yang baik atas Aset wakaf yang ada, yaitu dengan menjadikan harta benda wakaf lebih berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat yaitu dengan membangun masjid, mengembangkan usaha, pendirian BTM, dan pendirian lembaga pendidikan. Sehingga dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat tanpa mengambil atau mengurangi zatnya.



Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 1

Kerangka Pikir



Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kerangka pikir di atas terbangun atas adanya kesenjangan dan juga fenomena dimana wakaf hanyalah dipandang sebagai kegiatan pemberian yang dilaksanakan berdasarkan kemurahan dan berupa tindakan yang bersifat kuratif, sehingga Aset wakaf yang cukup besar menjadi kurang berkembang dan tidak berdayaguna. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai bagaimana instrumen wakaf dapat didorong ke arah yang lebih luas dan lebih produktif serta dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah sehingga bisa berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif menurut Kark dan Milles adalah tradisi tertentu dan ilmu-ilmu sosial yang secara fundanentaal bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan langsung dengan orang-orang tersebut.³¹ Penelitian yang dilakukan di lapangan dalam kancah yang

³¹ Soetrisno Hadi, *Metode Research*. I.Andi, Yoyakarta, 1993,h.3

sebenarnya.³² Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan implementasi manajemen wakaf pada lembaga sosial keagamaan dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam (studi pada lembaga pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung). Dalam hal ini data yang diperlukan untuk penelitian adalah data yang berkenaan dengan pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti bersifat menggambarkan suatu hal secara objektif. Menggambarkan dalam hal ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapat dari lapangan³³. Yaitu dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan apa adanya.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.³⁴ Data merupakan hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

³² Kartono dan Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Mandar Maju, Bandung, 1996) h. 32

³³ Husaini Usmandan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara, Jakarta 2008) h. 129

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 129.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud ialah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam bentuk responden, yaitu orang yang dijadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.³⁵ Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian adalah langsung dari nara sumber utamanya yaitu pengelola Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung dari tingkat Ketua, wakil ketua, sekretaris dan 7 anggota Pengurus majlis wakaf dan kehartabendaan pada PWM Lampung, sehingga dapat diperoleh informasi terkait manajemen Wakaf pada lembaga sosial keagamaan PWM Lampung yaitu berupa program kerja majlis wakaf dan kehartabendaan pada PWM Lampung dimulai dari pengembangan asset wakaf, pengamanan harta wakaf serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf. Sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan warga persyarikatan Muhammadiyah.

³⁵ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabata, 2009), Cet. Ketujuh, h.137.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁶ Dan data sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu literatur yang membahas mengenai manajemen wakaf, kesejahteraan, ekonomi Islam dan dokumen lainnya seperti majalah, artikel dan jurnal mengenai tema tersebut.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.³⁷ Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dimana pada PWM Lampung saat ini terdapat 14 wilayah yang dikelola sedangkan peneliti menggunakan wilayah Bandar Lampung sebagai objek penelitian, dikarenakan: *pertama* wilayah Bandar Lampung merupakan wilayah yang paling lama dalam mengelola majlis wakaf dan kehartabendaan di PWM Lampung, *kedua* total asset wakaf di kota Bandar Lampung merupakan salah satu pengelola asset wakaf terbesar di PWM Lampung.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, h.81.

1. Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Interview* (Wawancara)

Untuk memudahkan dalam mengetahui kondisi yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode *interview*. Metode *interview* adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden”.³⁸

Wawancara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Interview* tak terpimpin
- 2) *Interview* terpimpin
- 3) *Interview* bebas terpimpin.³⁹

Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin. *Interview* bebas terpimpin adalah pedoman pertanyaan hanya secara garis besarnya saja.⁴⁰ Dengan demikian, peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan dari tingkat Ketua, wakil ketua, sekretaris dan 7 anggota Pengurus majlis wakaf dan kehartabendaan pada PWM Lampung sehingga dapat diperoleh informasi terkait manajemen Wakaf pada lembaga sosial keagamaan PWM Lampung yaitu berupa program kerja majlis wakaf dan kehartabendaan pada PWM Lampung dimulai dari

³⁸ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 119.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 205.

⁴⁰ Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 119.

pengembangan asset wakaf, pengamanan harta wakaf serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf. Sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di lingkungan warga persyarikatan Muhammadiyah.

b. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.⁴¹ Dalam melakukan penelitian ini penulis bersifat non partisipan atau tidakn melibatkan diri dalam objek penelitian tersebut melainkan hanya mencatat dan mengumpulkan data mengenai Implementasi manajemen wakaf pada lembaga PWM Lampung dan implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang digunakan yang merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari informasi-informasi yang dibutuhkan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, majalah atau sumber data tertulis lainnya baik yang berupa teori, laporan penelitian atau penemuan sebelumnya (*findings*) yang berhubungan dengan tema tersebut.

⁴¹ W. Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h. 117

K. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dinalisis dengan beberapa cara antara lain:

a. Editing data yaitu apabila para pencari data (pewawancara atau pengamat) telah pulang kembali dari lapangan, maka berkas-berkas catatan atau informasi yang diperoleh itu dipersiapkan dan dikelola dengan baik untuk keperluan proses selanjutnya.⁴²

b. Koditing data yaitu apabila tahap editing telah selesai dilampaui, untuk menghasilkan data yang cukup baik dan cermat, maka kegiatan koditing dapatlah segera dimulai.⁴³ Rekonstruksi data (menyusun ulang) yaitu data disusun dengan teratur, akurat, dan logis.

c. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena.⁴⁴ Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan di PWM Lampung, terutama menggambarkan bagaimana implementasi manajemen wakaf dan implikasinya terhadap kesejahteraan

⁴²Koentjara Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, h. 270

⁴³*Ibid*, h. 270

⁴⁴Masyhuri Dan Zainudin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*, Refika Adutama, Bandung, 2008, h. 13

masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam. Ada beberapa sub analisis yang terbagi menjadi bagian yang lebih rinci, meliputi “Implementasi Managemen Wakaf” yang memfokuskan pada sub unit analisis bagaimana pengelolaan wakaf sehingga dapat lebih berdayaguna dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara sub analisis “Implikasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat” meliputi sub unit konsep kesejahteraan yang seluas-luasnya, meliputi sosial, ekonomi, dan pendidikan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen

1. Definisi Manajemen

Manajemen berasal dari kalimat *manage to man*. Kata *manage* berarti mengatur atau mengelola, sedangkan kata *man* berarti “manusia”. Menurut Malayu SP Hasibuan, manusia (*man*) menjadi salah satu unsur sumber daya, selain *money*, *materials*, *machines*, *methods*, dan *market*, yang dibutuhkan organisasi guna mencapai suatu tujuan.⁴⁵ Jika kedua kata tersebut maka manajemen berarti “mengelola atau mengatur manusia”

Untuk mencapai tujuannya, organisasi akan menghadapi persoalan terkait dengan keterbatasan berbagai unsur sumber daya, manusia sebagai pekerja memiliki keterbatasan fisik, uang sebagai modal sering kali kurang, material sebagai bahan baku proses atau produksi bermasalah dalam ketersediaannya, metode sebagai panduan untuk menyelesaikan pekerjaan masih bergantung pada pemahaman dan kemampuan pengelola, mesin sebagai alat produksi bergantung pada kemampuan kapasitas produksi, pasar sebagai tempat untuk menawarkan produk-produk perusahaan juga bergantung permintaan para konsumen, oleh karena itu organisasi harus mencari cara terbaik yang bisa dilakukan, seperti dengan mengelola sumber daya yang

⁴⁵ Kartoyo, *Dasar-dasar Manajemen*, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2016, h. 1

dimiliki agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengelolaan sumber daya tentu membutuhkan suatu proses seperti merencanakan, mempertimbangkan, memutuskan, dan melaksanakan.

Berikut definisi manajemen menurut para ahli :

a. Malayu SP Hasibuan

Menurut Malayu SP Hasuan, “Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan”.⁴⁶ Ilmu adalah sekumpulan pengetahuan tentang suatu objek yang disusun secara sistematis oleh para ahli sebagai hasil dari penelitian yang pernah dilakukan, pengetahuan yang mereka susun tentu mencakup teori, konsep, metode atau teknik tertentu sehingga dapat menjadi panduan atau referensi bagi siapapun untuk melakukan kegiatan yang sama, misalnya guna menyelesaikan persoalan-persoalan organisasi. Sementara itu, seni berkaitan dengan gaya atau cara untuk melakukan kegiatan. Seorang manager mempunyai gaya kepemilikannya sendiri yang berbeda dengan gaya kepemimpinan manager yang lainnya dalam mengelola organisasi, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa latar belakang kemampuan mereka tidaklah sama. Oleh karena itu manajemen menawarkan berbagai konsep atau teknik yang dapat digunakan oleh para manager untuk mengelola organisasi.

⁴⁶ *Ibid* 2

b. Amirulloh Haris Budiono

Menurut Amirulloh Haris Budiono, “manajemen mengacu pada sebuah proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efektif dan efisien melalui orang lain.”⁴⁷ Efektif berarti semua unsur sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat diberdayakan sebagaimana fungsinya masing-masing. Sementara efisien berarti pekerjaan yang telah ditentukan manajer dapat dilakukan dan diselesaikan oleh para pekerja sesuai dengan anggaran.

c. George R Terry dan Leslie W. Rue

Menurut George R Terry dan Leslie W. Rue, “Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang ke arah tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata”⁴⁸ artinya bimbingan perlu diberikan karena tidak semua pekerja terampil dalam melaksanakan kegiatan operasional. Cara yang digunakan untuk membimbing tentu bergantung pada kebijakan dan keinginan pemimpin.

Dari uraian diatas secara sederhana manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses pengelolaan sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai.

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *ibid*

2. Fungsi Manajemen

Untuk dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan maka organisasi harus menerapkan dan melakukan kegiatan operasional dan kegiatan managerial, kegiatan operasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja/karyawan, misalnya kegiatan produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan administrasi. Sementara kegiatan managerial adalah kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin atau manajer organisasi, misalnya pengambilan keputusan perencanaan berbagai kegiatan para pekerja, dan pembuatan berbagai peraturan kerja seperti prosedur, kebijakan, dan teknik-teknik pelaksanaan kerja. Selain itu mereka juga harus melakukan apa yang dikenal sebagai *fungsi manajemen*.

Fungsi manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para manajer sebagai usaha untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Fungsi manajemen tidak hanya dilakukan oleh manajer atas seperti pemimpin organisasi, tetapi juga oleh manajer menengah dan manajer bawah. Ada banyak tugas yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh para manajer organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Amirullah Haris Budiono menyatakan bahwa manajer paling tidak harus melaksanakan empat fungsi, yaitu Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid* h.5

1. Perencanaan(*Planning*)

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan saat ini untuk menentukan masa depan. Secara operasional tujuan organisasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan profit dan tujuan non profit. Organisasi bertujuan profit harus menentukan besarnya produksi, target penjualan,serta biaya yang akan dikeluarkan. Dengan membandingkan biaya-biaya dan pendapatan yang diperoleh,dengan demikian organisasi bisa mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh. Sementara itu, organisasi non profit bisa menetapkan berbagai variabel yang dapat memuaskan para pelanggan atau masyarakat.⁵⁰ Setelah menenukan tujuan yang ingin dicapai,organisasi akan mencari dan memilih beberapa cara sebagai sasaran yang akan dikerjakan. Sebagai contoh,setelah menetapkan tujuan yaitu meningkatkan pendapatan,organisasi profit akan mencari cara untuk menaikkan pendapatan,misalnya dengan cara melakukan penjualan produk murah,penjualan berhadiah, dan penjualan berdiskon. Bagi non profit,setelah menentukan tujuan mereka akan mencari cara-cara untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat, misalnya dengan memberikan layananann pelanggan, layanan kenyamanan dan layanan pelayanan. Untuk menentukan tujuan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan penuh ketelitian, kegiatan tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab para manager yang bertindak sebaga perencana, kegiatan

⁵⁰ *Ibid*

perencanaan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh manager saja bahkan dewan komisaris pun bisa mengerjakannya. Menurut Malayu SP Hasibuan, fungsi perencanaan dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu peramalan, pembetulan tujuan, pemrograman, penjadwalan dan penganggaran.⁵¹

2. Pengorganisasian(*Organizing*)

Pengorganisasian adalah fungsi untuk mengelompokkan pekerjaan atau bisa juga disebut sebagai suatu proses pengelompokan pekerjaan-pekerjaan serta memberikan wewenang pada salah satu pekerja sebagai pemimpin kelompok. Kegiatan-kegiatan organisasi kecil untuk mencapai tujuan tentu dapat diurus oleh satu orang atau dengan bantuan dari beberapa orang terdekat seperti anggota keluarga dan saudara. Namun tidak demikian bagi organisasi besar yang memiliki banyak pekerjaan untuk diselesaikan. Pekerjaan-pekerjaan organisasi besar harus dikelompokkan agar lebih mudah diselesaikan. Tiap pekerja yang direkrut organisasi apat ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dengan adanya beberapa kelompok pekerjaan, para pekerja akan lebih mudah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, seperti yang diamanatkan oleh organisasi. Demikian juga dengan organisasi kegiatan pengelompokan pekerjaan dapat memperjelas siapa yang menjalankan dan bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

Pengorganisasian memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang manajer ketika mengelompokkan kegiatan, dalam proses tersebut manajer akan membahas dan mempertimbangkan beberapa hal, sehingga pengelompokan kegiatan akan menjadi lebih efektif.

3. Pengarahan(Actuating)

Pengarahan adalah fungsi untuk mempengaruhi para pekerja agar mereka bersemangat dalam bekerja dan mampu memberikan hasil yang maksimal. Fungsi pengarahan perlu diterapkan dalam organisasi karena tidak semua pekerja bersemangat untuk menjalankan kegiatan berorganisasi.⁵²

4. Pengendalian(Controling)

Pengendalian adalah fungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam sebuah kegiatan, kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan pasti akan muncul karena suatu kegiatan ditangani oleh banyak pekerja. Kesalahan-kesalahan tersebut pasti akan mempengaruhi hasil kinerja. Apabila banyak produk yang dihasilkan cacat, seperti cacat jumlah, kualitas, dan kuantitas, organisasi pasti kecewa dan langkahnya untuk mencapai tujuan akan terhambat. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pekerjaan, organisasi perlu dengan segera melakukan tindakan preventif, yang kemudian menjadi tugas dan tanggung jawab para manajer.⁵³

⁵² *Ibid* h.6

⁵³ *Ibid*

B. Wakaf

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *Waqofa, yaqifu, waqfan* yang berarti ragu ragu,berhenti, memberhentikan, memahai, mencegah, menahan,memperlihatkan,meletakan,mengabdi,dan tetap berdiri.⁵⁴

Wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa`ah*) di jalan Allah.⁵⁵ Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁵⁶

Pengertian ini senada dengan wujud wakaf yang terdapat dalam Hadits Muslim dan Umar bin Khatab yang menyatakan bahwa wakaf tidaklah boleh dijual belikan,diwariskan,atau dihibahkan. Para ulama memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang menunjukan larangan untuk menjual,mewariskan atau menghibahkan, salah satu dari pengertian yang disampaikan adalah dalam hukum fiqh,wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf) atau kepada suatu badan

⁵⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 2002, h. 1579

⁵⁵ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafa Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010, h. 77

⁵⁶ *Ibid*

pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.⁵⁷

Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda terhadap hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh antara lain sebagai berikut:

1) Imam Abu Hanifah

Mengartikan wakaf sebagai menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *waqif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan *waqif* itu sendiri. Dengan artian, *waqif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Apabila *waqif* meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah “menyumbangkan manfaat”.⁵⁸

2) Madzhab Maliki

Berpendapat, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, akan tetapi wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *waqif* berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Maka dalam hal

⁵⁷ Suparman Usman, *Hukum perwakafan di Indonesia*, Darul Press, Serang, 1993, h. 23

⁵⁸ M.Attoillah, *Hukum Wakaf*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung, 2014, h. 7

ini wakaf tersebut mencegah *waqif* menggunakan harta wakafnya selama masa tertentu sesuai dengan keinginan *waqif* ketika mengucapkan akad (*sighat*). Jadi pada dasarnya perwakafan ini berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁵⁹

3) Syaf'iyah dan Ahmad bin Hambal

Berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *waqif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang dibolehkan oleh syariah, dimana selanjutnya harta wakaf itu menjadi milik Allah.⁶⁰

Dari beberapa definisi wakaf diatas, maka wakaf dapat diartikan sebagai suatu harta atau benda yang tetap zatnya atau tahan lama yang dilakukan seseorang dengan cara memisahkan sebagian hartanya yang diserahkan pada seseorang atau *nazir* (penjaga wakaf) atau badan pengelola untuk diambil manfaatnya atau hasilnya demi kepentingan umum sesuai dengan syariat islam.

Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

⁵⁹*Ibid*,h.7

⁶⁰*Ibid*,h.8

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur`an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur`an dan contoh dari Rasulullah Saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur`an

Beberapa ayat yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Surat Ali Imran ayat:92

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S: Ali-Imran:92)

Kutipan ayat tersebut menunjukkan bahwa menafkahkan harta yang kita cintai merupakan salah satu jalan sekaligus syarat untuk menyempurnakan semua kebajikan lain yang sudah, sedang, dan akan kita lakukan. Bisa jadi seseorang telah banyak berbuat baik. Tampaknya dengan menafkahkan sebagian hak milik yang sangat dicintai untuk perjuangan di jalan Allah, barulah akan sampai kepada kebajikan/keshalehan yang sempurna.

2) Surat Al-Baqarah ayat:261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي

كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S: Al-Baqarah: 261)

3) Surat Al-Baqarah ayat:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ

تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah:267).

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

b. Al-Hadits

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadits tentang hal ini secara lengkap adalah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب اصاب ارضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال : يا رسول الله اني اصب ارضا بخير لم اصب مالا قط انفس عندي منه فما تأمرني به قال : ان شئت حبست اصلها فتصدقت بها عمر انه لا يباع ولا يوهب ولا يرث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لاجناح على من وليها ان ياكل منها با المعرف ويطعم غير متمول (رواه مسلم)

Artinya: Dari Ibnu Umar R.A ia berkata: Umar bin khatab memperoleh tanah di khaibar ,lalu ia bertanya kepada Nabi dengan berkata ``Wahai Rosululloh ,saya telah memperoleh tanah di khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya

daripadanya ?`` maka Rasulullah bersabda ``Kalau kamu mau ,tahan sumbernya dan sedekahkan manfaatnya atau faedahnya``lalu Umar menyedekahkannya ,ia tidak boleh dijual,diberikan atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin ,untuk keluarga,untuk memerdekakan budak ,untuk orang yang berperang di jalan Allah ,orang musafir dan para tamu ,bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya ,seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan(HR.Muslim).⁶¹

Adapun Hadits lain yang dapat dijadikan dasar wakaf adalah

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفِعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

Artinya:Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.” (HR Muslim) (Muslim ibn Al-Hajjaj, 1992:1255).

Bertitik tolak dari beberapa ayat al-Quran dan hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang diterapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Sehingga ajaran wakaf ini diletakan pada wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta’abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek

⁶¹ Salim Baharaisy, Shoheh Muslim Jilid II, Visi Insan, Jakarta, 1986, h. 160. Lihat juga Mardani, Ayat- ayat dan Hadist Ekonomi Syariah, Cetakan kedua Rajawali Pers, Jakart, 2012.

pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan dan lain-lain. Meskipun demikian dalil dari Al Qur'an dan As Sunnah yang sedikit ini telah menjadi pedoman para ahli fiqh Islam. Sejak masa Khulafaurrosyiddin sampai dalam membahas dan mengembangkan dalam hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka, sebab itu sebagian besar hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad.

Sedangkan dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah Nasional telah dituliskan beberapa peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam perwakafan diantaranya:

- 
- 1) Undang Undang Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
 - 2) Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41/2004.
 - 3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
 - 4) Instruksi Menteri Agama No. 15 Tahun 1989 tentang pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Persertifikatan tanah wakaf.
 - 5) Instruksi Menteri Agama dan Kepala BPN No. 04 tahun 1990 No. 24 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
 - 6) Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 dan No. 3/SKB/2004, tentang Sertifikat Tanah Wakaf.

3. Rukun Dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.⁶²

Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- 1) *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- 2) *Mauquf‘alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- 3) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- 4) *Shighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶³

b. Syarat Wakaf

Dari rukun-rukun wakaf yang telah disebutkan diatas, masing-masing mempunyai syarat tersendiri yang harus dilakukan demi sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Waqif* (orang yang mewakafkan)

Dalam hal ini syarat *waqif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada di bawah pengampuan. Karena *waqif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka wakaf hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *waqif* tersebut.

- 2) *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

⁶² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Fiqh kontemporer*, Grafika, Bandung, 2004), h.

⁶³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Perss, Jakarta, 2015, h. 21

Dalam perwakafan, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

a) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya).

Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.

b) Harta wakaf itu jelas bentuknya.

Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

c) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *waqif*.

d) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

3) *Maukuf 'alaih* (peruntukan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *waqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

4) *Shighat* (ikrar wakaf)

Pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari *waqif* dan tidak perlu qabul dari *maukuf* ‘*alaih*. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Secara garis besar, syarat sahnya *shighat* ijab, baik lisan maupun tulisan ialah :

- a) *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat* ijab diucapkan atau ditulis.
- b) *Shighat* tidak diikuti syarat batil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.
- c) *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari’atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari’at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran *nadzir* sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan *nadzir* sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa *waqif* harus menunjuk *nadzir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan *nadzir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta wakaf tidak sia-sia.

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada *nadzir* itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya.

Untuk lebih jelasnya persyaratan *Nadzir* wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

a. Syarat moral

- 1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
- 2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.

3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha..

4) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

b. Syarat manajemen

1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.

2) Visioner.

3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.

4) Profesional dalam pengelolaan harta.

c. Syarat bisnis

1) Mempunyai keinginan.

2) Mempunyai pengalaman

3) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukan bahwa *nadzir* menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas *nadzir*, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jadi jelas berfungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran *nadzir*.⁶⁴

4. Hikmah Diisyaratkannya Wakaf

⁶⁴Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, jakarta: 2007, h. 49-52

Setelah diketahui pengertian wakaf, yaitu menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya kepada orang-orang atau badan hukum untuk dipelihara dan dimanfaatkan di jalan yang diridhoi Allah Swt⁶⁵, barang yang boleh diwakafkan adalah , semua yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan barangnya (Barang yang diwakafkan itu masih ada) maka dari itu terkandung beberapa hikmat dari disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah:

- a. Harta benda yang diwakafkan tetap dapat terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan. Karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.⁶⁶
- b. Orang yang mewakafkan meskipun sudah meninggal dunia, masih tetap menerima pahala, sepanjang barang wakafnya masih tetap ada dan masih dimanfaatkan.

Wakaf merupakan sumber dana yang penting, yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat, antara lain untuk pembinaan kehidupan beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam. dan lebih khusus bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat fisik dan lain sebagainya.

5. Macam-Macam Wakaf di Indonesia

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf Ahli

⁶⁵*Ibid*, h. 43

⁶⁶Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafa Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Cetakan Pertama, Kementrian Agama RI, Jakarta, 2010, h. 77

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si *waqif* atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut Wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si *waqif* akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf⁶⁷. Pada perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat, karena sering menimbulkan dalam pengelolaannya dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahi harta wakaf. Di beberapa negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, wakaf untuk keluarga (ahli) telah dihapuskan, karena pertimbangan dari berbagai segi tanah wakaf dalam bentuk ini dinilai tidaklah produktif.⁶⁸

b. Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam hadits nabi Muhammad Saw, yang menceritakan wakaf sahabat Umar bin al-Khattab.

⁶⁷ Mundjir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Cetakan Ketiga, KHALIFA, 2007

⁶⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Manajemen Pengelola Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2011, h. 34

Beliau memberikan hasil kebunya kepada fakir, miskin, Ibnu Sabil, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan untuk umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan wakaf jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang dapat mengambil manfaatnya, selain itu jenis wakaf inilah yang sesuai dengan tujuan perwakafan pada umumnya.

Secara substansial wakaf inilah yang merupakan salah satu segi cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah Swt, dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan dan perekonomian. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum) tidak hanya keluarga atau kerabat yang terbatas.⁶⁹

C. Konsep Manajemen Wakaf

1. Pengertian dan fungsi manajemen wakaf

Prinsip-prinsip manajemen dalam Islam merupakan prinsip yang universal dan berlaku bagi semua golongan masyarakat di dunia dan semua negara. Prinsip manajemen Islam sebagai suatu disiplin ilmu, yang mana prinsip ini digali dari Al Quran dan Hadits. Teori manajemen Islam tentu memberi injeksi moral dalam konsep

Direktorat Pengembangan wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta, 2005, h. 42

managemen itu sendiri. Yakni dengan mengatur bagaimana seharusnya seorang indivdu berperilaku, baik dalam suatu organisasi maupun dalam sebuah sosial kemasyarakatan.

Dalam dimensi perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membuthkan managemen dalam menjalankan tugasnya, managemen ini digunakan untuk mengatur sebuah kegiatan yang dilakukan dalam perwakafan, menghimpun wakaf, dan menjaga hubungan baik antar nadzhir, wakif dan masyarakat. Untuk itu prinsip-prinsip managemen dirasa sangatlah penting untuk dikaji lebih jauh dalam hal ini. Istilah managemen berasal dari kata *manage* berarti *control*, yang dalam bahasa indonesia managemen diartikan mengedalikan, menangani atau mengelola.⁷⁰

Dalam literatur managemen, menurut Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, managemen adalah suatu proses yang terdiri dari *Planning, Organizing, Leading, dan controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan pengetahuan bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi utama managemen.⁷¹ Definisi yang sama juga dirumuskan oleh James A. Stoner. R Edward Freeman dan Daniel R. Gilbet J.R yang mendefinisikan bahwa managemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasii melalui rangkaian kegiatan berupa *planning, organizing, leadiing dan controlling* pekerja anggota organisasi dan menggunakan

⁷⁰ Ibnu Manzbur Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Al Ansari, *Lisan Al Arab*, jilid 2 . h 13

⁷¹ Kathryn M. Bartol dan David C. Martin, *Managemen*, (New York, Mc Graw Hill, 1998) H. 5

semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan menurut Peter F. Drucker manajemen adalah seni atau proses dalam menyelesaikan suatu terkait dengan pencapaian tujuan agar tujuan dari organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Pada dasarnya definisi manajemen baik dalam Islam maupun dalam ilmu ekonomi tidaklah jauh berbeda, manajemen dianggap sebagai ilmu sekaligus seni kepemimpinan. Menurut Ahmad Ibrahim Abu Siin dalam bukunya *al idarah fi al-Islam*, manajemen dipandang sebagai pengetahuan yang dikumpulkan, disistematisasi, dan diterima berhubungan dengan kebenaran-kebenaran universal tentang manajemen. Sedangkan dalam tataran seni, manajemen diartikan sebagai kekuatan pribadi yang kreatif ditambah dengan keterampilan dan pelaksanaan. Manajemen merupakan seni organisasi dan pemanfaatan bakat manusia. Manajemen juga diartikan sebagai rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan sebuah organisasi sebagai suatu sistem ekonomi teknis.⁷² Ahmad Al Habib mengemukakan bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan menggerakkan semua sumber daya untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.⁷³ Demikian manajemen merupakan proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengorganisasian,

⁷² James A. F. Stoner R Edward Freeman Dan Daniel R Gilbert JR, *Managemen*, (New Jersey, Prentice Hall, Inc, A Simon , 1995) h. 7

⁷³ Ahmad Al-Shahab, *Mabadu Al Idarah*, (Makkah, Jamiah Malik Abdul Aziz 2010) h.

kepemimpinan, dan pengawasan dengan mengerjakan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam wakaf manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan wakaf dapat berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen wakaf yang dilakukan mengarah kepada kegiatan wakaf secara efektif dan efisien. Manajemen perlu dijelaskan berdasarkan fungsi-fungsinya. Yang mana fungsi manajemen merupakan sebuah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan dan dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu satuan administratif. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi manajemen itu dapat dilihat dari pengertian manajemen menurut Robert K. Trewatha dan M Gene Newport, dimana manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengontrolan pelaksanaan aktifitas organisasi agar koordinasi sumber daya manusia dengan sumber daya materil berjalan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan.⁷⁴ Tidak berbeda dengan konsep ini, Ahmad Al Shahab dalam bukunya *Mabadi al Idarah* juga mengemukakan bahwa unsur utama dari manajemen adalah perencanaan (*al- takhthith*), pengorganisasian (*al-tanzim*), kepemimpinan (*al-qiyadah*), dan pengawasan (*Ar-riqabah*).⁷⁵

Jadi manajemen wakaf merupakan proses membuat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan berbagai usaha

⁷⁴ Robert L. Trewatha dan M Gene Newport, *Managemen* (Texas, Businnes Publication, 1982) hlm 5

⁷⁵ Ahmad Al-Shahab, Op.cit h.11

dari nazhir, kemudian menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran. Oleh karena itu setiap manager wakaf atau nazhir harus menjalankan keempat fungsi tersebut didalam organisasi sehingga hasilnya merupakan satu kesatuan yang sistematis, misalnya setiap orang bisa merencanakan dan menyusun pekerjaannya, tetapi mereka belum bisa dianggap sebagai manager bila kemampuan hanya sebatas merencanakan tanpa bisa melaksanakannya. Dari beberapa pandangan diatas, fungsi manajemen ada empat yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Berikut ini akan diuraikan masing-masing fungsi dari manajemen tersebut :

1. Perencanaan (Planning/al-Takhthith)

Perencanaan merupakan keputusan terdahulu tentang apa yang akan dilakukan. Menurut Leslie W. Rue dan Liod L. Byars dalam bukunya yang berjudul *Managemen Skill Dan Aplication*, perencanaan merupakan keputusan tentang apa sasaran yang akan dicapai selama waktu yang akan datang dan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan sasaran tersebut.⁷⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, merumuskan perencanaan setrategi sebagai proses penentuan tujuan suatu organisasi, penentuan kebijakan, dan program yang diperlukan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Kemudian menetapkan metode yang

⁷⁶ Lesliie W. Rue dan Liod L. Byars, *Op.cit.*, h.5

diperlukan untuk menjamin kebijakan dan program strategi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi.⁷⁷

Ini berarti perencanaan merupakan fungsi manajemen yang penting dan inheren dalam setiap aktifitas seorang manager. Perencanaan merupakan suatu aktifitas yang paling krusial bahkan merupakan langkah awal untuk menjalankan kegiatan sebuah organisasi.⁷⁸ Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika Kartin M. Bartol berpendapat, bahwa organisasi tanpa perencanaan tidak ubahnya seperti perahu layar tanpa kemudi.⁷⁹ Sementara itu usaha untuk mencapai tujuan organisasi akan menjadi sia-sia. Dengan demikian, perencanaan merupakan fungsi utama yang ada dalam manajemen. Karena fungsi manajemen itu sangat berpengaruh terhadap fungsi-fungsi manajemen lainnya. Seperti merealisasikan perencanaan dan pengawasan agar dapat mewujudkan tujuan yang direncanakan.

Oleh karena itu perubahan yang hendak dilakukan sampai pada tujuan haruslah direncanakan terlebih dahulu. Setidaknya, ada upaya untuk membangun cita-cita kedepan dengan kapasitas yang telah dimiliki. Dengan demikian langkah-langkah yang hendak ditempuh hendaknya disusun dengan rapi, menyusun perencanaan merupakan sikap positif untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

Seperti yang telah diisyaratkan dalam firman Allah:

⁷⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit* ., H.58

⁷⁸ Ahmad Al-Shabab , *Op.cit* .,h.82

⁷⁹ Karhryn M. Bartol dan David C Martin, *Op.cit* ., h. 135

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS Al-Rud :11)*

Dari pengertian perencanaan yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli diatas, berkaitan dengan perencanaan dalam perwakafan, maka ada tiga hal mendasar yang termaksud didalamnya, yaitu: 1) Dari sisi proses, dimana perencanaan merupakan pproses dasar yang digunakan untuk menetapkan suatu tujuan pengelola wakaf dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat terealisasi., menentukan sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar keberhasilan dalam pencapaian tujuan. 2) dari sisi fungsi manajemen, perencanaan akan mempengaruhi dan memberikan wewenang pada nazhir untuk menentukan rencana kegiatan organisasi. 3) dari sisi pengambilan keputusan, perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau masa yang akan datang mmengenai apa yang akan dilakukan Nazhir, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya.


Pada intinya, perencanaan dibuat dalam upaya untuk merumuskan apa sesungguhnya yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi serta bagaimana sesuatu yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Kemudian diwujudkan melalui serangkaian rumusan rencana kegiatan tertentu.⁸⁰

Suatu rencana yang baik harus memberikan jawaban dari enam pertanyaan berikut⁸¹ 1) tindakan apa yang harus dilakukan? Suatu rencana haruslah membuat suatu penjelasan rincian kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan, faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan –kegiatan agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan. 2) mengapa tindakan ini harus dilakukan ? suatu rencana harus memuat penjelasan mengapa kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan dan mengapa tujuan yang ditentukan itu harus tercapai. 3) Diman tindakan itu harus dilakukan? Suatu rencana harus memuat penjelasan tentang lokasi fisik setiap kegiatan yang harus dikerjakan sehingga tersedia segala fasilitas yang dibutuhkan untuk mengerjakan kegiatan tersebut. 4) Kapan tindakan itu harus dilakukan? Suatu rencana harus memuat penjelasan mengenai bagaimana waktu dimulainya pekerjaan dan diselesaikanya pekerjaan, baik untuk tiap-tiap bagian pekerjaan maupun untuk seluruh pekerja. Disini harus ditetapkan standar waktu untuk mengerjakan, baik bagian-bagian pekerjaan maupun untuk seluruh

⁸⁰ Robert L. Trewatha dan M. Gene Newport, Op.cit. h. 80-81

⁸¹ *Ibid.*, h.81

pekerjaan. 5) siapa yang akan mengerjakan tindakan tersebut? Suatu rencana harus memuat penjelasan tentang para petugas yang akan mengerjakan para pekerjaanya, baik mengenai kuantitas maupun kualitas, yakni kualifikasi-kualifikasi pegawai, seperti keahlian, pengalaman, dan sebagainya. 6) bagaimana caranya melaksanakan tindakan itu? Suatu rencana harus memuat penjelasan tentang teknik mengerjakan pekerjaan.



Perencanaan berguna sebagai pengarah untuk meminimalisasi ketidakpastian, dan pemborosan sumber daya dan sebagai penetapan standar dalam kualitas pengawasan. Disamping itu, rencana merupakan pedoman agar organisasi memperoleh dan mempergunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga anggota organisasi melaksanakan aktifitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dengan adanya perencanaan manager dapat memonitor dan mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan sehingga tindakan korektif dapat diambil jika kemajuan tidak memuaskan.

Dengan demikian, perencanaan itu berisi rumusan tindakan-tindakan yang penting untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan. Ini berarti seorang manager wafat memikirkan terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan metode, rencana dan logika. Karena perencanaan akan mengarahkan tujuan organisasi wafat dan

menetapkan prosedur terbaik untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan bukanlah peristiwa tunggal dngan awal dan akhir yang jelas. Perencanaan merupakan proses berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan skitar oorganisasi.⁸²

2. Pengorganisasian(*Organizing/al-Tanzhim*)

Pengorganisasian adalah mempertemukan dan mengorgaaniisasikan sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁸³ yang dimaksud dalam pengertian ini adalah mengajak manusia dalam organisasi, membagi tanggung jawab, mengelompokan pekerjaan dalam berbagai unit, menyusun, mengaplikaikan sumber daya dan menciptakan kondisi yang baik sehingga sumber daya manusia dan sumber daya lainya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan secara maksimal. Pengertian lain dari pengorganisasian menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn, pengorganisasian pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai proses penetapan struktur peran melalui penentuan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuuan organisasi, pengelompokan aktifitas-aktifitas, penugasan kelompok-kelompok kepada manager-manager, pendelegasian wewenang dan informasi

⁸² Rozalinda, *Managemen wakaf produktif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 77

⁸³ Thomas S. Batteman dan Scott A. Snell, *Managemen Competing in The New Era*, (New York, McGraw-Hill, 2002) h. 14

baik yang bersifat horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi.⁸⁴

Dengan adanya pengorganisasian, memungkinkan untuk mengatur sumber daya insani nazhir wakaf guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, dengan segala potensi yang ada secara efektif dan efisien. Padamasa awal Islam, Rosululloh telah menjelaskan fungsi pengorganisasian dalam pemerintahan, Rosul menentukan program kerja untuk mencapai tujuan dan memilih para pegawai untuk menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.⁸⁵

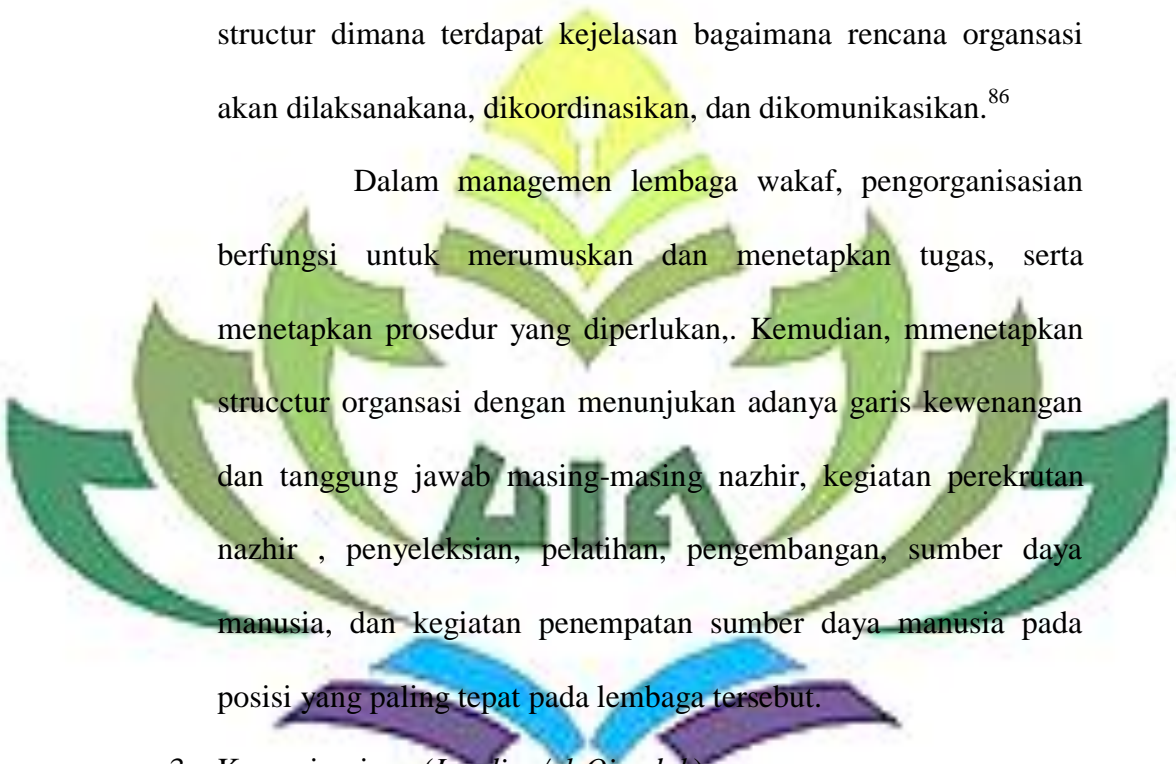
Pemimpin yang berada pada manajemen puncak memiliki hak untuk mengatur kegiatan manajemen yang berbeda dan berhak mengeluarkan kebijakan. Dalam pengorganisasian terdapat struktur kepemimpinan yang memungkinkan terdapat pemimpin untuk beberapa level serta adanya hubungan antara atasan dan bawahan. Secara struktural bawahan hanya menerima perintah dari atasan dan atasan hanya bertanggung jawab kepadanya.

Dalam proses pengorganisasian wakaf, manager wakaf atau ketua nazhir mengalokasikan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi(atructur organsasi). Yang mana struktur organisasi merupakan desain organisasi dimana manger wakaf melakukan

⁸⁴ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit.*, h. 66

⁸⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit.*, h. 68

alokasi sumber daya organisasi, terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Jika dalam fungsi perencanaan, tujuan dari rencana ditetapkan dalam pengorganisasian rencana tersebut diturunkan dalam sebuah pembagian kerja tertentu dalam sebuah struktur dimana terdapat kejelasan bagaimana rencana organisasi akan dilaksanakan, dikoordinasikan, dan dikomunikasikan.⁸⁶



Dalam manajemen lembaga wakaf, pengorganisasian berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian, menetapkan struktur organisasi dengan menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab masing-masing nazhir, kegiatan perekrutan nazhir, penyeleksian, pelatihan, pengembangan, sumber daya manusia, dan kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat pada lembaga tersebut.

3. Kepemimpinan (*Leading/al-Qiyadah*)

Pengawasan(*leading*) berarti membangkitkan semangat orang lain untuk menjadi pelaku organisasi yang baik. Maksudnya ialah mengarahkan, memotivasi, dan mengomunikasikan dengan karyawan secara perorangan dan kelompok.⁸⁷ Termasuk dalam

⁸⁶ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulloh, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana Prenada Grup, 2008), h. 152

Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefulloh, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:kencana prenada Media Gru, 2008) h.125

pengertian leading adalah melakukan interaksi dengan manusia dari hari demi hari, membantu mengarahkan dan memberikan inspirasi pada mereka untuk mencapai tujuan tim dan organisasi.

Berkaitan dengan wakaf, dalam fungsi atau tahap kepemimpinan, yang harus dilakukan adalah dengan mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi pada nazhir yang direkrut agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan wakaf. Kemudian, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepemimpinan ditujukan agar pprogram wakaf yang telah disusun bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi, serta memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas tinggi. Seorang pemimpin memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan maju atau tidaknya suatu perusahaan. Untuk itu, keua nazhir baik perorangan maupun organisasi harus memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing anggotanya untuk maju dalam rangka meraih tujuan bersama. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, analiisa yang tajam, percaya diri, berjiwa besar, dan kuat untuk memahami orang

lain.⁸⁸ Berikut ini akan diuraikan beberapa kompetensi yang harus dimiliki orang seorang pemimpin yaitu:

a. Kemampuan strategis

Kemampuan dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin dapat mengetahui kondisi lingkungan dimana harta wakaf itu berada yang melingkupi operasional organisasi yang dipimpinnya. Atau dalam arti kemampuan untuk membuat perencanaan, kebijakan atau progra-program yang harus dijalankan untuk mewujudkan tujuan wakaf. Bagaimana seorang pemimpin mampu mengelola sumber daya nazhir dan sumber daya lain dalam mencapai suatu tujuan.⁸⁹

b. Kemampuan Interpersonal

Kemampuan dalam hal ini dimaksudkan pada kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan.⁹⁰ Hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan sebuah perusahaan ataupun organisasi sehingga akan terjadi kesatuan pemahaman.

c. Kemampuan Teknis

Kemampuan dalam hal ini diartikan sebagai sebuah pengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki seorang

⁸⁸ Ahmad Al-shahab, *Op.cit*, h.136

⁸⁹ Leslie W. Rue dan Liod L. Byars, *Op.cit*, h. 7

⁹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.cit.*, h. 104

pemiimpin untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin atau kemampuan untuk menggunakan peralatan tertentu guna memperlancar pekerjaan.⁹¹

4. Pengawasan(*Controlling/al-Riqabah*)

Controlling atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktifitas sebenarnya telah sesuai dengan yang direncanakan.⁹² Pengawasan memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun terjadi berbagai perubahan.

Berkaitan dengan manajemen wakaf hal ini dirasa penting dikarenakan untuk menghindari terjadinya *mismanagement* ataupun penyalahgunaan harta wakaf, fungsi kontrol perlu berjalan dengan baik. Wakaf yang tersebar ke berbagai sektor dijumlahkan dan dibandingkan dengan jumlah wakaf yang terkumpul, bila jumlah yang terkumpul sama dengan jumlah asset yang tersebar dalam berbagai sektor investasi berarti pengelolaan wakaf berjalan dengan baik. Sebaliknya, bila wakaf yang terkumpul tidak sama atau kurang dibandingkan asset wakaf yang tersebar pada berbagai sektor artinya pengelolaan wakaf tidak berjalan dengan baik dan terjadi penyimpangan.⁹³ Dalam fungsi pengawasan yang harus dilakukan nazhir adalah mengevaluasi pencapaian tujuan dan target

⁹¹ AhmadIbrahi Abu Sinn, *Op.cit.*, h. 113

⁹² Ahmad Al-shahab, *Op.cit.*, h. 165

⁹³ Rozalinda, *Managemen wakaf produktif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015., h. 85

tujuan sesuai dengan standar atau prinsip investasi dalam perspektif ekonomi Islam, Dalam pengawasan terhadap lembaga pengelolaan wakaf, demi tercapainya pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien tentu ditopang dengan *Standar Operation Procedure* (SOP) yang dijadikan acuan dan pedoman bagi organisasi. Dalam manajemen wakaf SOP mutlak diperlukan karena dari sinilah nazhir dapat mengontrol kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan target wakaf, serta melakukan tindakan evaluasi dan koreksi terhadap kekurangan maupun penyimpangan yang terjadi.

Diantara titik yang membedakan teori manajemen dalam Islam dengan teori lainnya ialah fokus dan konsen pada segala variabel yang berpengaruh terhadap aktifitas manajemen didalam dan diluar organisasi, kemudian ia menghubungkan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial. Teori manajemen Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku,. Dengan kata lain, tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada etika yang melingkupinya.⁹⁴

1. Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya

⁹⁴ Ibid.h. 92

disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan untuk bercocok tanam dan hasilnya disalurkan untuk digunakan masyarakat umum.⁹⁵

Atau wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan paada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁹⁶ Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Dimana, donasi wakaf dapat berupa harta benda bergerak uang dan logam mulia maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Pada dasarnya wakaf itu produktif, dalam arti harus menghasikan karena wakaf dapat memenuhi tujuan jika telah menghsilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Orang yang pertama melakukan perwakafa adalah Umar bin khathab, dengan mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaibar, kemudian kebun tersebut dikelola dan hasilnya untuk kepentingan masyarakat.⁹⁷

Tentu wakaf ini adalah wakaf produktif dalam arti mendatangkan aspek ekonomi dan berdapak pada kesejahteraan masyarakat, akan tetapi ironinya di indonesia banyak pemahaman masyarakat yang

⁹⁵ Munzir Qahar, *Manajemen wakaf produktif*, PT Khalifa, Jakarta, 2005, h. 5

⁹⁶ Agustiano wakaf produktif untuk kesejahteraan umat <http://Agustiano.niriah.com>. 2008

⁹⁷ *Ibid*

mengasumsikan wakaf adalah lahan yang tidak produktif bahkan mati, seperti kuburan, masjid, dll.

Dalam pengelolaan wakaf produktif pihak yang paling berperan berhasil atau tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah Nazhir wakaf, yaitu seseorang atau lembaga yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf,⁹⁸ walaupun dalam kitab-kitab fiqh para ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir menjadi sangatlah dibutuhkan, bahkan menempati pada peranan sentral. Sebab dipundak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil manfaat wakaf kepada sasaran wakaf.⁹⁹

Kemampuan mengelola tanah yang minim, disamping karena faktor letak yang tidak strategis secara ekonomi dan kondisi tanah yang gersang, hambatan yang cukup mencolok untuk mengelola tanah wakaf secara produktif adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) kondisi ini banyak dialami oleh para nazhir wakaf yang ada dipedesaan di hampir seluruh pelosok nusantara, bahwa kemampuan menggarap masih sangatlah minim.¹⁰⁰

⁹⁸ Diterbitkan oleh direktorat pemberdaya wakaf, direktorat jendral bimbingan masyarakat islam departemen agama RI Tahun 2007, h 41

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 70

Disamping kendala teknis tanah yang tidak strategis secara ekonomis, didalam masyarakat kita masih pro kontra terhadap pengalihan atau pertukaran tanah wakaf untuk tujuan yang produktif maupun pemanfaatanya. Misalnya, ada seorang wakif yang mewakafkan tanah kebunya untuk pesantren di pusat kota, sementara tanah yang wakif miliki di pedesaan jauh dari pesantren tersebut, sementara pesantren tidak memiliki modal yang cukup untuk mengelola tanah wakaf tersebut, sehingga tanah wakaf seperti ini tidak bisa dikelola dengan baik karena kendala transportasi dan sasaaran lain, namun ketika para wakif ditawarkan bahwa tanah wakaf tersebut sebaiknya dijual dan hasil penjualan untuk kepentingan pesantren terebut seperti gedung perpustakaan misalnya, ternyata para wakif banyak yang menolaknya dikarenakan meyakini paham bahwasanya wakaf tidak bisa dijual.

2. Macam-Macam Wakaf Produktif

a. Wakaf uang

Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja, wakaf uang dapat dipandang memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

Dari Wahbah Az-Zuhaily, dalam kitab Al Fiqh Islamy Wa Adilatuha, menyebutkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf

uang karena uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemashlahatan umat.¹⁰¹

Bahkan MUI juga telah menuliskan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut:

- 1) Wakaf uang (cash wakaf /waqf al-nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.
- 2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat surat berharga.
- 3) Wakaf yang hukumnya jawaz(boleh).
- 4) wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar`i.
- 5) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.

Selain fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga tentang bolehnya wakaf uang.

Lembaga pengelola wakaf uang dapat melakukan pemberdayaanya dengan memberikan bantuan modal investasi maupun modal kerja, sehingga dengan demikian akan berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena wakaf merupakan instrumen financial islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dalam upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan ekonomi, seperti pemberdayaan

¹⁰¹*Ibid*

ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian sesungguhnya wakaf sangatlah mempunyai peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tatananan sosial ekonomi yang dapat dirasakan manfaatnya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dibidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan profesional disertai kualitas para pengelolanya.

Dalam mengalokasikan wakaf uang, pengelola wakaf dapat menyalurkannya pada kelompok-kelompok usaha, misalnya penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, peternakan, dan usaha produkf lainnya sehingga pengaruh pengelolaan wakaf uang melalui pemberian modal kerja kepada masyarakat akan sangat membantu dalam pengembangan usaha-usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Untuk mengukur pengaruh yang dimunculkan oleh pengelola wakaf uang dapat dilihat dari indikator-indikator berupa pergerakan sektor rill dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, menurut MA Mannan, salah satu indikator efektivitas wakaf uang adalah *income redistribution*(redistribusi pendapatan), pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil-hasil wakaf uang berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal, pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat bermanfaat bagi masyarakat yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi masyarakat, misalnya sarana pendidikan ataupun

peningkatan pendapatan bagi masyarakat, seperti halnya zakat. Menurut Ahmed(2004), wakaf dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan mempunyai kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan program penyaluran wakaf uang ke sektor riil seperti ini juga merupakan pengejawantahan program pengentasan kemiskinan.¹⁰²

b. Sertifikat wakaf tunai

Adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar, sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah.

c. wakaf saham

Sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat, bahkan dengan modal yang besar saham akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

3. Tujuan Kepengurusan Wakaf Produktif

Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan

¹⁰² Muhammad Qadr Basa, *Qanun Al-adl Wa Al-inshaf Al Qadha`ala muykilat al auqaf*, Dar as-salam, Kairo, 2006, h. 21

tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf, sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin.
- b. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf.
- c. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan.
- d. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf.
- e. Memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.

4. Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif

- a. Peraturan perundangan perwakafan

Sebelum lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Perwakafan di Indonesia diatur dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agrarian.

- b. Pembentukan badan wakaf Indonesia

Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan

Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir *nadzir-nadzir* (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

c. Pembentukan kemitraan usaha

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura

d. Penerbitan sertifikat wakaf tunai

Manfaat lain dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh Bank. Maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.

5. Program Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Program jangka pendek

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Keberadaan badan wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan *nadzir* dan Pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional.

b. Program jangka menengah dan panjang

Dengan mengembangkan lembaga-lembaga *nadzir* yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, badan wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai pengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif, yaitu dengan cara:

- 1) Dukungan sumber daya manusia
- 2) Dukungan keuangan
- 3) Dukungan pengawasan
- 4) Pemberdayaan tanah wakaf produktif

Sehingga tanah-tanah wakaf produktif yang sudah inventarisir oleh departemen agama RI yang meliputi seluruh Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk aset wakaf yang menghasilkan produk barang maupun jasa atau dengan aset wakaf yang berbentuk investasi usaha.

6. Wakaf Sebagai Pranata Ekonomi Islam

Dana wakaf yang berhasil dieksplorasi dari masyarakat baik berupa benda-benda bergerak¹⁰³ ataupun benda-benda tidak bergerak¹⁰⁴ yang dikelola dengan bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah atau dikembangkan melalui perusahaan nasional atau perusahaan daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi yang cepat, terutama dikalangan ekonomi masyarakat menengah kebawah.

Praktik wakaf yang menjangkau wakaf uang, wakaf saham, dan surat-surat berharga memiliki kekuatan ekonomi yang besar yang dapat diberdayakan melalui lembaga-lembaga keuangan syariah.¹⁰⁵ Lembaga-lembaga keuangan syariah dengan berbagai produk yang ditawarkan kepada pelaku bisnis sesuai kapasitas dana yang tersedia akan dapat mendorong pada pertumbuhan ekonomi yang non ribawi. Selain itu wakaf juga menjadi instrumen penting dalam membantu percepatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan skala mikro seperti program *warungisasi*¹⁰⁶ dan *kambingisasi*¹⁰⁷ dan sebagainya.

Apabila penduduk muslim sebanyak 200 juta dapat mewakafkan uang 10 ribu rupiah perorang/tahun, maka akan terkumpulkan dana sebesar 2

¹⁰³ Benda-benda bergerak meliputi: uang, logam, surat berharga, kendaraan, kitab, buku, dan lainnya. Lihat ps 16 ayat 3 Undang-Undang No.41 tahun 2014

¹⁰⁴ Benda-benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan barang-barang atau hak yang mengikuti benda-benda tidak bergerak. Lihat ps 16(ayat) 2 Undang-Undang No. 41 tahun 2004

¹⁰⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonosia, Yogyakarta, 2003, h. 30-32

¹⁰⁶ Warungisasi merupakan sebuah aktifitas pelatihan dan pemberian modal untuk berusaha dengan membuka warung. Lihat A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmiyanto dan Rozidayanti(Jakarta, CIBER-PKTTI-UI,2001),h.37

¹⁰⁷ Kambingisasi adalah pemberian kambing kepada kelompok miskin untuk dikelola dan di ternak. . Lihat A. Manan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmiyanto dan Rozidayanti(Jakarta, CIBER-PKTTI-UI,2001),h.37

triliun/tahun. Selanjutnya dikelola dengan sistem perbankan yang amanah dan diperkenalkan bentuk-bentuk usaha dengan prinsip muamalah seperti, mudharabah, musyarakah, bay` as salam, murabahah, dan ijarah. Dengan demikian wakaf akan dapat membawa pada kemaslahatan ummat(kesejahteraan)

D.Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1.Pengelolaan Tanah Menurut Hukum Islam

Mengenai pengelolaan tanah wakaf yang tujuannya untuk kesejahteraan umat, kemudian dalam masalah perwakafan ini harus dipenuhi rukun dan syaratnya sehingga wakaf yang dilakukan menjadi sah.

Jika wakaf itu berupa tanah, maka tidak boleh dijual,diwariskan, dan diberikan kepada orang lain,hal ini dimaksudkan agar perwakafan yang dilakukan tidaklah putus kemanafaatanya bagi masyarakat umum,sehingga harta tersebut merupakan amal jariyah bagi yang berwakaf,yang mana amalnya akan terus menerus mengalir. Harta wakaf adalah titipan Allah yang diperuntukkan bagi kepentingan umum demi kesejahteraan umat.

Islam sangat melarang tanah wakaf yang menjadi milik umat bersama dijual dan dialihkan pada pihak lain.

Meurut Imam syafi`i bahwa menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun,seperti wakaf untuk keturunan sendiri. Imam Syafi`i membolehkan penerima wakaf untuk mewakafkan barang wakaf khusus manakala ada alasan yang memang benar-benar mengharuskan untuk

itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf itu boleh menebangnya dan menjadikanya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.¹⁰⁸

Sedangkan Imam Maliki mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarah Al Zarqani (yang terangkum dalam fiqh lima mazdhab), dimana wakaf boleh dijual dalam tiga keadaan: pertama manakala pewakaf mensyaratkannya agar barang yang diwakafkannya itu dijual, sehingga persyaratan yang ditetapkan tersebut harus diikuti¹⁰⁹. kedua apabila barang yang diwakafkan itu termasuk jenis barang yang bergerak, dan tidak lagi memenuhi maksud perwakafannya, dan harga penjualannya bisa digunakan untuk barang yang sejenis atau yang sepadan dengan itu, ketiga barang yang tidak bergerak boleh dijual untuk keperluan perluasan masjid, jalan dan kuburan, sehingga barang itu rusak dan tidak berfungsi lagi.¹¹⁰

Kemudian Imam Hanafi mengatakan boleh mengganti semua bentuk barang wakaf, baik yang umum maupun yang khusus, kecuali masjid. Untuk itu mereka menyebutkan tiga hal: pertama pewakaf mensyaratkan itu ketika melangsungkan perwakafan, kedua barang wakaf sudah berubah menjadi barang yang tidak berguna, ketiga apabila penggantinya merupakan barang yang lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan, serta tidak bersyarat.¹¹¹

Menurut Madzhab yang lain, mereka berpendapat dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan menjadi milik yang diberi

h.34 ¹⁰⁸ Direktorat Pengembangan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Departemen Agama, Jakarta, 2003,

¹⁰⁹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih lima madzhab*, Lentera, Jakarta, 2004, h. 670

¹¹⁰ *Ibid*, h. 671

¹¹¹ *Ibid*, h. 676

wakaf(*Ma`kuf alaih*), meskipun *ma`kuf alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual ataupun menghibahkannya.¹¹²

2. Pengelolaan Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif

Senada dengan hukum islam undang-undang No. 41 tahun 2004 menjelaskan bahwa, harta benda yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹¹³

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain: dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan serta pendidikan serta usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.¹¹⁴

Masalah pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam pasal 42 undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diatur bahwa:

Nadzhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.¹¹⁵ Selanjutnya dalam pasal 43 undang-undang tersebut dikatakan bahwa:

¹¹² Direktorat Pengembangan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Departemen Agama, Jakarta, 2005, h. 4

¹¹³ Direktorat Jendral Bisma Islam Dan Penyelenggaraan Haji, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005, h. 27

¹¹⁴ *Ibid*, h. 42

¹¹⁵ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdaya Wakaf, *Manajemen Pengelolaan Proyek Percontohan Wakaf Produktif*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2011, h. 14

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- b. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan secara produktif.
- c. Dalam harta pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperuntukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

E. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Secara harfiah sejahtera berasal dari kata sansekerta, yaitu *Catera* yang berarti payung, artinya orang yang sejahtera adalah orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, kekhawatiran, sehingga hidupnya aman dan tentram baik lahir maupun batin.¹¹⁶ Sedangkan menurut undang-undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa kesejahteraan ialah: suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹¹⁷

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimanaseluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut

¹¹⁶ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan sosial*, Rafika Aditama, Bandung, 2012, h. 8

¹¹⁷ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 Ayat (31)

dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.¹¹⁸ Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan kesejahteraan yang masih rendah.¹¹⁹

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.¹²⁰

Sejahtera berarti aman sentosa makmur, atau selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Dalam artian yang luas kesejahteraan juga bisa dikatakan sebagai rasa aman dan tidak terganggu dari hal apapun.¹²¹ Sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala

¹¹⁸Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, *Berita Resmi Statistik*, No. 08/07/18/TH.IX, 17 Juli 2017

¹¹⁹*Ibid.*

¹²⁰Undang-Undang No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2.

¹²¹Fadhil Nurdin, *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: PT Angkasa, 1990),

macam gangguan,kesukaran,dan sebagainya.¹²² Pengertian ini sejalan dengan pengertian ``Islam`` yang berarti selamat,sentosa, aman, dan damai. dari pengertian ini maka dapat dipahai bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri,misi inilah yang sekaligus menjadi misi Rasul Nabi Muhammad Saw, sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran:

Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Kesejahteraan adalah aman, sentosa, makmur. Sehingga arti kesejahteraan ini meliputi keamanan,keselamatan,dan kemakmuran.¹²³ Dimana keamanan merupakan suatu keadaan terjaminnya jiwa maupun raga seorang baik individu maupun golongan.Adapun keselamatan merupakan keadaan meliputi terlindungi dari masalah fisik, sosial, keuangan,pekerjaan,psikologis,dan perkara-perkara lain yang membuat kerusakan dan kejadian yang tidak diinginkan. Sedangkan kemakmuran merupakan keadaan seseorang ketika terpenuhinya atau tereukupinya kebutuhan-kebutuhan seseorang baik lahir maupun batin.

Dibawah ini beberapa pengertian kesejahteraan menurut para ahli:

a. Walter A FriendLander

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan,serta

¹²² W. J. S Poerwadarwinta, *Pengertian Kesejahteraan Manusia*. Mizan, Bandung, 1996, h.126

¹²³ *Ibid*

hubungan-hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka kembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.¹²⁴

b. Arthur Dunham

Kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan sosial yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian melalui orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial.¹²⁵

c. Umar Chapra

Menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan

¹²⁴ <http://responsitiri.usu.ac.ai>. Universitas sumatra utara, ``kesejahteraan sosial dan usaha kesejahteraan sosial(on line), 1 Desember 2015

¹²⁵ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 28

pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.¹²⁶

Dari definisi kesejahteraan masyarakat diatas, maka dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam dimensi material maupun spiritual. Kesejahteraan merupakan impian semua orang dalam hidupnya. Kesejahteraan berarti suatu tujuan manusia untuk kehidupan yang lebih baik. Kesejahteraan erat kaitannya dengan sosial, karena kesejahteraan merupakan tujuan makhluk sosial.¹²⁷ Kemakmuran atau kesejahteraan merupakan tujuan manusia yang utama.¹²⁸

Kesejahteraan pada hakikatnya bernilai subjektif, bergantung pada pandangan hidup dan pola pikir individu. Namun hanya pandangan hidup dan pola pikir yang benar, yang dapat membawa seseorang menuju kesejahteraan yang hakiki, kesejahteraan yang tidak hanya terbatas duniawi namun sampai pada kesejahteraan akhirat.

2. Indikator Kesejahteraan menurut BPS

Menurut BPS indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ada delapan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan

¹²⁶M. B. Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003,

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸Minto Purwo S. dkk., *Pelajaran Ekonomi*, (Jakarta:Yudistira, 2000), h.17.

kesehatan, kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi.¹²⁹ Kedelapan indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (> Rp. 10.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp. 5.000.000)¹³⁰

b. Indikator pengeluaran digolongkan menjadi 3 item yaitu:

- 1) Tinggi (> Rp. 5.000.000)
- 2) Sedang (Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000)
- 3) Rendah (< Rp. 1.000.000)¹³¹

c. Indikator tempat tinggal yang dinilai ada 5 item yaitu jenis atap rumah, dinding, status kepemilikan rumah, lantai dan luas lantai. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Permanen

Kriteria permanen ditentukan oleh kualitas dinding, atap dan lantai.

Bangunan rumah permanen adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu kualitas tinggi, lantai terbuat dari ubin/keramik/kayu kualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes

¹²⁹Badan Pusat Statistik (BPS), *Indikator Kesehatan Rakyat Welfare Indicators*, 2015, h.3

¹³⁰*Ibid*, h. 4

¹³¹*Ibid*.

2) Semi Permanen

Rumah semi permanen adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plaster/kayu kualitas rendah, lantainya dari ubin/semen/kayu kualitas rendah dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

3) Non Permanen

Sedangkan rumah tidak permanen adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun) lantainya dari tanah dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya¹³²

d. Indikator fasilitas tempat tinggal yang dinilai terdiri dari 12 item, yaitu pekarangan, alat elektronik, pendingin, penerangan, kendaraan yang dimiliki, bahan bakar untuk memasak, sumber air bersih, fasilitas air minum, cara memperoleh air minum, sumber air minum, fasilitas MCK, dan jarak MCK dari rumah. Dari 12 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

1) Lengkap

2) Cukup

3) Kurang¹³³

e. Indikator kesehatan anggota keluarga digolongkan menjadi 3 item yaitu:

¹³²*Ibid.*

¹³³*Ibid*, h.5

- 1) Bagus (< 25% sering sakit)
- 2) Cukup (25% - 50% sering sakit)
- 3) Kurang (> 50% sering sakit) ¹³⁴

a. Indikator kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan terdiri dari 5 item yaitu jarak rumah sakit terdekat, jarak toko obat, penanganan obat-obatan, harga obat-obatan, dan alat kontrasepsi. Dari 5 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Mudah
- 2) Cukup
- 3) Sulit ¹³⁵

g. Indikator kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan terdiri dari 3 item yaitu biaya sekolah, jarak ke sekolah, dan proses penerimaan. Dari 3 item tersebut kemudian akan digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

- 1) Mudah
- 2) Cukup
- 3) Sulit ¹³⁶

h. Indikator kemudahan mendapatkan transportasi terdiri 3 item, yaitu ongkos kendaraan, fasilitas kendaraan, dan status kepemilikan kendaraan. Dari 3 item tersebut kemudian akan di digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu:

¹³⁴*Ibid*, h.6

¹³⁵*Ibid*.

¹³⁶*Ibid*.

- 1) Mudah
- 2) Cukup
- 3) Sulit ¹³⁷

Dari indikator-indikator diatas maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan dapat membawa korelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pembangunan haruslah diorientasikan pada seluruh asset bangsa, dan hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

3. Kesejahteraan dalam Islam

Para Fuqaha sepakat bahwasanya kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah, pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara material dan spiritual. ¹³⁸

Islam menekankan bahwa manusia adalah mahluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Agama Insani press, Jakarta, 2000, h. 2-3

saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non materi seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.¹³⁹ Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan spiritual, yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁴⁰ Standar kehidupan masyarakat dapat dilihat melalui beberapa indikator yang telah ditentukan oleh Biro Pusat Statistik (BPS). Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁴¹ Dimana kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Adapun spiritual merupakan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban beragama, serta mencari arti dan tujuan hidup.

¹³⁹ Ilyas Alimudin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, (On line): <http://tribunnews.com> (6 Desember, 2015)

¹⁴⁰ Bahrudin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPPSTM YK, Yogyakarta, 2002, h.146

¹⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009``Tentang kesejahteraan Masyarakat``

Konsep ekonomi islam, terdapat satu titik awal yang harus kita perhatikan, yang mana ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *Aqidah Islamiah* yang bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah yang bepedoman pada Al qur`an dan Al hadits. Menurut M.Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa prilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.¹⁴²

Sedangkan menurut Muhammad Bin Arabi ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi tentang yang kita ambil dari Al Quran dan Al hadits dan pondasi ekonomi yang dibangun atas pokok pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹⁴³ Dan adapun menurut Abdul Mannan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.¹⁴⁴

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka bisa diartikan bahwa ekonomi islam merupakan kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat yang berlandaskan pada Al quran, Al hadits, Ijma, Qiyas sehingga

¹⁴² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, h.1

¹⁴³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekononomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 10

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 10

berujung pada kontribusi solutif terhadap tercapainya kehidupan yang bermartabat sesuai dengan yang digariskan oleh Alloh Swt.

a. Konsep kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam

Al-Falah diambil dari kata *falah* yang bermakna *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al falah yang artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.¹⁴⁵ Dalam Al-Qur`an Allah berfirman yang artinya :

``*Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman(QS. Al-Mukmmiinun:1).*``

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah falah berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi dan seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Al Qur`an dan As-Sunnah.¹⁴⁶

Dari pengertian diatas maka *fallah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik itu bersifat lahir maupun batin, yang mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Imam Al-Ghazalli menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, Jiwa, akal,

¹⁴⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, h. 1534

¹⁴⁶ Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, *Al Fallah Fi Al Kitab Wa As sunnah*(On-Line), <http://www.Qaradaghi.com>(8 Desember 2015)

keluarga, dan keturuna, harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu:¹⁴⁷

- 1) Kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 2) Kebutuhan skunder yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- 3) Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan menghiasi hidup.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian Al Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup, kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari skunder. Kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup.¹⁴⁸

Kebahagiaan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur`an tercermin dari surga yang huni oleh Adam dan Istrinya, sesaat sebelum

¹⁴⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 62

¹⁴⁸ *Ibid*

mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Seperti telah diketahui, sebelum Adam dan Istrinya turun ke bumi mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhlat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada Adam:¹⁴⁹

Kesejahteraan sesungguhnya adalah kehendak utama dalam Islam dan siapa pun harus memperolehnya, terlebih mereka yang terpinggirkan. Sejak Indonesia merdeka, salah satu tujuan utama pendirian negara ini adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.¹⁵⁰ Cita-cita mulia ini masih terus diupayakan untuk direalisasikan agar tujuan ini dapat dinikmati oleh segenap bangsa Indonesia.

Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari ruh Islam itu sendiri sebagai misi Rasulullah SAW, sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*¹⁵¹

¹⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*(Bandung:Mizan, 1996), h. 127

¹⁵⁰ Arief Subhan dkk., *SKJ: Islam untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h.2

¹⁵¹ Q.S. Al-Anbiyaa (21): 107

Ayat tersebut menjadi gambaran bahwa Allah SWT memerintahkan bagi manusia untuk sebuah kehidupan yang penuh dengan kemakmuran dan kasih sayang sesama umat. Semua manusia berhak untuk memperoleh kesejahteraan keadilan dan kemakmuran, oleh karena itu kesejahteraan harus diperjuangkan.

Kesejahteraan dan kemakmuran dapat diperoleh dengan cara mencari karunia Allah di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”¹⁵²

Kebahagiaan hidup di akhirat memang merupakan tujuan bagi setiap umat, namun kehidupan dunia tidak boleh dilupakan agar jalan

¹⁵²Q.S. Al-Qashsh (28): 77

menuju kehidupan akhirat tersebut dapat dicapai dengan baik tanpa gangguan ekonomi, misalnya karena kekurangan pangan.¹⁵³ Secara tegas Allah SWT menganjurkan hal ini sebagaimana firmanNya:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁵⁴

Tidak ada jalan lain untuk mencapai kesejahteraan tanpa adanya kerja keras. Hubungan antara kerja keras dan perintah zakat amatlah dekat. Pada hakikatnya, perintah zakat itu mengisyaratkan mengenai perintah kerja keras. Karena sebelum kita dapat menunaikan zakat, kita harus bekerja keras terlebih dahulu untuk mendapat harta kekayaan yang mencapai *nishab*.¹⁵⁵

Dalam konsep ekonomi islam, terdapat satu titik awal yang perlu di perhatikan, yang mana ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *Aqidah Islamiah* yang bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah yang bepedoman pada Al Qur'an dan Al hadits. Menurut M.Umar Chapra

¹⁵³LM. Harafah, *Ekonomi dan Bisnis Islam, Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 401.

¹⁵⁴Q.S. Al-Jum'ah (62): 10

¹⁵⁵LM. Harafah, *Ekonomi dan..*, h.401

ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.¹⁵⁶

Secara umum, kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat dapat terjadi bila semua lapisan dalam masyarakat tersebut sudah bisa menikmati kehidupan yang layak. Tidak ada lagi kesenjangan besar di antara golongan-golongan tertentu.¹⁵⁷ Dalam artian golongan kaya menyisihkan hartanya untuk golongan yang miskin. Anjuran ini mengisyaratkan bahwa dengan adanya perguliran harta dari yang kaya kepada yang miskin akan mempersempit kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

4. Perhatian Islam terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia mana pun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya.¹⁵⁸

Memberi makan orang miskin adalah sebuah realisasi dari keimanan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mudatsir:

¹⁵⁶Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 1

¹⁵⁷*Ibid*, h.402

¹⁵⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.49

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٧٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ﴿٧٩﴾ فِي جَنَّاتٍ

يَتَسَاءَلُونَ ﴿٨٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٨٢﴾ قَالُوا لَمْ

نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ ﴿٨٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٨٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُ

مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٨٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٨٦﴾

Artinya: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, Kecuali golongan kanan, Berada di dalam syurga, mereka tanya menanya, Tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak Termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, Dan Kami tidak (pula) memberi Makan orang miskin, Dan adalah Kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, Dan adalah Kami mendustakan hari pembalasan."¹⁵⁹

Memberi makan orang miskin meliputi juga memberi pakaian, perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan pokoknya.¹⁶⁰ Perintah “memberi makan” dalam ayat ini berarti mengajurkan, mendorong, mendoakan.¹⁶¹ Islam memberi perhatian yang sangat luar biasa terhadap penganggulan kemiskinan untuk kehidupan umat yang sejahtera. Begitu banyak ayat-ayat di Al-Quran yang menghimbau agar

¹⁵⁹ Q.S. Al-Mudatsiir (74): 38-46

¹⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, h.51

¹⁶¹ *Ibid.* h.52

memperhatikan golongan miskin dan memberi makan orang miskin, juga ancaman kepada yang membiarkan orang miskin terlunta-lunta, dan cara Islam “memberi makan orang miskin” yaitu dengan zakat sebagai instrumen utamanya.

1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ekonomi Islam

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, oleh karena itu dia haruslah mengembangkan kepribadianya dalam masyarakat, dan jika dihubungkan dengan kesejahteraan, maka kesejahteraan dalam islam tidaklah hanya dinilai dari ukuran material saja, akan tetapi juga diukur dari nilai non materi seperti, terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial.¹⁶²

Sehingga kesejahteraan akan tercipta dengan seimbang, tidak mementingkan kebutuhan yang bersifat material saja akan tetapi juga ditekankan kebutuhan spiritual, yang meliputi kebutuhan keagamaan yang akan mengontrol setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap masyarakat.

Para Fuqaha sepakat bahwasanya kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah, pandangan ini dalam konsep ekonomi Islam memberikan penjelasan bahwa kesejahteraan dilakukan melalui penghapusan kesulitan dan ketidaknyamanan serta meningkatkan kualitas kehidupan secara material dan spiritual.¹⁶³

¹⁶²Ilyas Alimudin, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, (On line): <http://tribunnews.com>(6 Desember, 2015)

¹⁶³ M. Umar Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Agama Insani press, Jakarta, 2000, h. 2-3

Sedangkan kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.¹⁶⁴ Sedangkan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa: kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶⁵ Dimana kebutuhan material merupakan kebutuhan materi seperti: sandang, pangan, papan, dan kebutuhan lain yang bersifat primer, sekunder, dan tersier. Adapun spiritual merupakan kebutuhan untuk memenuhi kewajiban beragama, serta mencari arti dan tujuan hidup.

Dalam konsep ekonomi islam, Kategori Kemaslahatan diantaranya meliputi, *pertama* Kebutuhan Dharuriyyat dimana kebutuhan dharuriyyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya esensial. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya tingkat kebutuhan ini akan mengakibatkan “tidak sempurna kehidupan manusia,¹⁶⁶ atau “akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat”. Menurut Fathurrahman, kebutuhan dharuri ini merupakan kebutuhan yang sifatnya esensial, sifat ke-esensialan ini melekat pada lima kriteria, yaitu

¹⁶⁴ Bahrudin, Rudy, *Ekonomika Otonomi Daerah*, UPPSTM YK, Yogyakarta, 2002, h.146

¹⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2009``Tentang kesejahteraan Masyarakat``

¹⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah, menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 222

agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Sama seperti pengertian di atas, Wael B. Hallaq juga mandalami konsep kemaslahatan yang di-*tiori*-kan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dengan menyebutkan kebutuhan *dharuri* mencakup dalam lima aspek yaitu agama, akal, keturunan, harta dan jiwa. *Dharuriyyat* (secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak), yang mengandung lima prinsip yang disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan sebagai aspek-aspek hukum yang sangat dibutuhkan demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan keduniaan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek-aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Dharuriyyat* diwujudkan dalam dua pengertian: pada satu sisi, kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara disisi lain, segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan harus disingkirkan. Ibadah misalnya, bertujuan untuk mempertahankan agama dan hukum sesuai dengan keimanan dan aspek-aspek ritualnya, seperti shalat, puasa dan haji. Adat dan kehidupan sehari-hari yang diatur oleh hukum juga dimaksudkan untuk mempertahankan jiwa dan akal manusia sesuai dengan eksistensi duniawi, seperti sandang, pangan dan papan. Misalnya, Perjanjian kontrak, perdagangan dan transaksi lainnya bertujuan untuk mempertahankan keturunan dan harta kekayaan. Di sisi lain, hal-hal buruk yang diperkirakan dapat mengancam terwujudnya hal-hal yang bersifat daruriyah harus dicegah oleh hukuman dengan berbagai bentuknya, sehingga dapat dipastikan lima prinsip universal tadi dapat digolongkan sebagai

daruriyyah. Kedua Kebutuhan Hajiyyat, Secara istilah hajiyyat yaitu aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan kebutuhan yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa tesa tertekan dan terkekang. seperti jual beli dengan cara 'Araya yang mengandung resiko, dan mempersingkat pelaksanaan ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, kedua contoh ini merupakan penyerhanaan hukum saat hal-hal yang darurat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Keringanan-keringanan hukum seperti ini diperlukan agar kehidupan dan hukum yang dimiliki umat islam dapat diterima. Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Jika kebutuhan ini tidak tercapai tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan, akan tetapi akan ada kesulitan. Kebutuhan hajiyyat merupakan penunjang bagi kebutuhan dharuriyyat. Misalnya, seperti yang dijelaskan oleh Amir Syarifuddin bahwa sekolah sebagai kebutuhan hajiyyat karena sekolah membantu dalam proses perolehan ilmu yang justru dapat meningkatkan kualitas akal. Kebutuhan hajiyyat secara ringkas dikategorikan kepada tiga, yaitu hal yang disuruh Syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur dharuri. Ketiga, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. *Ketiga* Kebutuhan Tahsiniyyat, Secara bahasa tahsiniyyat berarti penyempurna yang tertuju pada aspek-aspek hukum

seperti anjuran memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya. Hal-hal tersebut bukanlah merupakan kebutuhan mendesak dalam pengertian apabila tidak dilaksanakan maka hukum menjadi tidak berjalan dan tidak lengkap dan tidak melaksanakannya tidaklah merugikan daruriyyat dan hajiyyat, namun mereka sangat berarti dalam memberikan nilai tambah bagi karakter syariat secara umum.

Ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada *Aqidah Islamiah* yang bersumber dari ketetapan-ketetapan Allah yang bepedoman pada Al Qur'an dan Al hadits. Menurut M.Umar Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada pada koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu dan tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.¹⁶⁷ Sedangkan menurut Muhammad Bin Arabiekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum ekonomi tentang yang kita ambil dari Al Quran dan Al hadits dan pondasi ekonomi yang dibangun atas pokok pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.¹⁶⁸ Dan adapun menurut Abdul Mannan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial ekonomi yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan teoritis*, Kencana, Jakarta, 2009, h.1

¹⁶⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekononomi Islam*, Erlangga, Jakarta, 2012, h. 10

¹⁶⁹ *Ibid*, h. 10

Dari beberapa definisi yang dikemukakan diatas, maka bisa diartikan bahwa ekonomi islam merupakan kajian ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh suatu masyarakat yang berlandaskan pada Al quran, Al hadits, Ijma, Qiyas sehingga berujung pada kontribusi solutif terhadap tercapainya kehidupan yang bermartabat sesuai dengan yang digariskan oleh Alloh Swt. Konsep kesejahteraan (Falah) dalam Ekonomi Islam diambil dari kata *falah* yang bermakna *zhafara bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut al falah yang artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat.¹⁷⁰ Dalam Al-Qur`an Allah berfirman yang artinya :

``*Sesungguhnya beruntung orang-orang yang beriman (QS. Al-Mukminun:1).*``

Sedangkan menurut Prof. Dr. Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, secara istilah falah berarti: kebahagiaan dan keberuntungan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dilihat dari segala sisi dan dimensi dan seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Al Qur`an dan As-Sunnah.¹⁷¹

Dari pengertian diatas maka *fallah* bisa diartikan segala kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seseorang, baik itu bersifat lahir maupun batin, yang

¹⁷⁰ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, h. 1534

¹⁷¹ Syaikh Muhammad Muhyiddin Qaradaghi, *Al Fallah Fi Al Kitab Wa As sunnah* (Online), <http://www.Qaradaghi.com> (8 Desember 2015)

mengukur tingkat kebahagiaan karena ia bersifat keyakinan dalam diri seseorang.

Imam Al-Ghazalli menerangkan bahwa kesejahteraan secara umum berkaitan dengan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama, Jiwa, akal, keluarga, dan keturunan, harta atau kekayaan. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu dibagi

menjadi beberapa tingkat, yaitu:¹⁷²

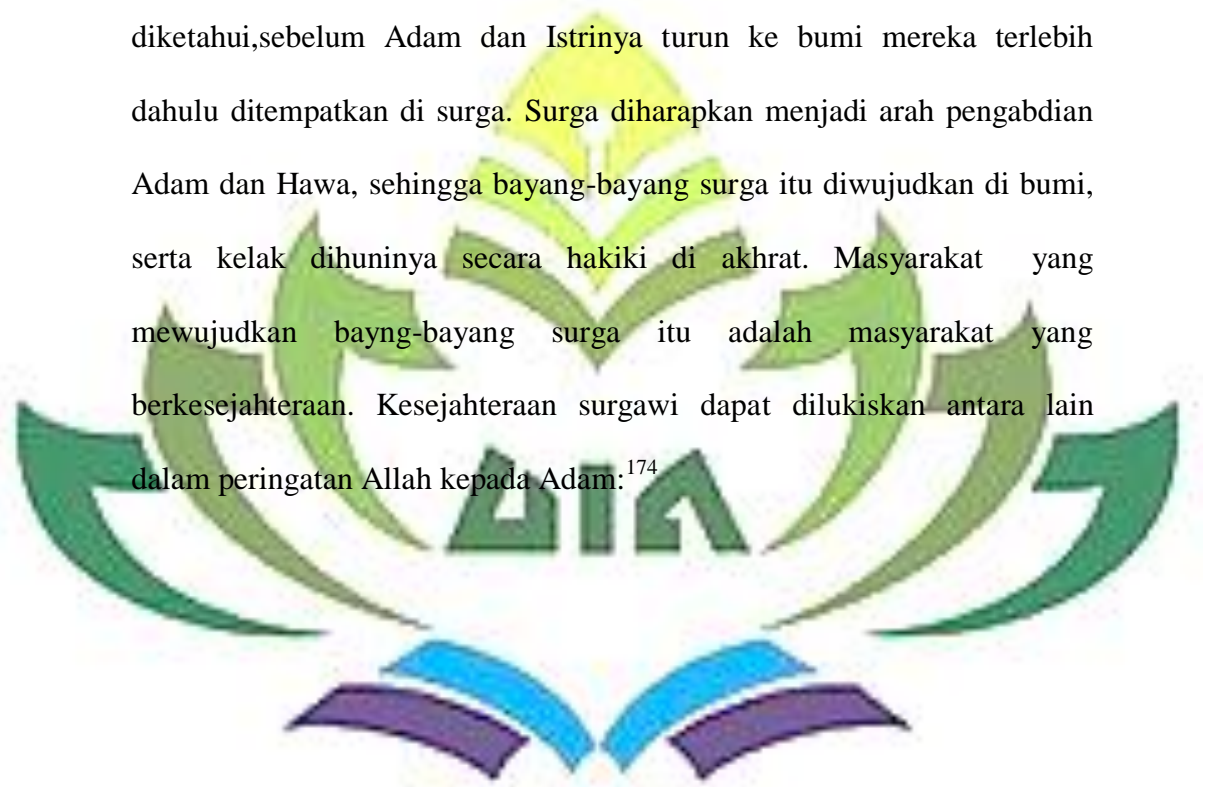
- 4) Kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.
- 5) Kebutuhan skunder yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam hidup.
- 6) Kebutuhan tersier mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi, dan mengisi hidup.

Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian Al Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat dan dapat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari semua hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan

¹⁷² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h. 62

dan kesukaran dalam hidup, kelompok ketiga mencakup kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari skunder. Kenyamanan saja yang terdiri dari hal-hal yang melengkapi, menerangi dan menghiasi hidup.¹⁷³

Kebahagiaan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur`an tercermin dari surga yang huni oleh Adam dan Istrinya, sesaat sebelum mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Seperti telah diketahui, sebelum Adam dan Istrinya turun ke bumi mereka terlebih dahulu ditempatkan di surga. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa, sehingga bayang-bayang surga itu diwujudkan di bumi, serta kelak dihuninya secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan. Kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah kepada Adam:¹⁷⁴



¹⁷³ *Ibid*

¹⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 127

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin Zumar, *Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam Kemanusiaan* vol,13. No.2, STAIN Salatiga,2013
- Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Vol 36.NO 1, Juni,Jakarta, 2013.
- Abdul Ghofur Ruslan Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2013.
- Al –alabij Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Rajawali, Jakarta,1992.
- Djunaidi Ahmad dan Al – Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, 2006.
- Djunaidi Ahmad dan Al-Asyhar Tholib, *Menuju Era Wakaf Produktif (Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Ummat)*, Cetakan Kedua, Mitra Abadi Press, Jakarta, 2005.
- Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- Direktorat Urusan Agama Islam Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Peraturan Perundang – Undangan Perwakafan Tanah Milik*, Departemen Agama RI, Jakarta , 1984.
- Direktorat Pemberdaya Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Cetakan Keempat, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia* ,Departemen Agama RI, Jakarta ,2007.
- Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2007.
- Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*,Departemen Agama RI, Jakarta ,2007.
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Strategi Pengembangan dan Penyelenggaraan Haji Wakaf Tunai di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2005.

Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta ,2007.

Direktorat Pemberdaya Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam,
Pengelolaan Wakaf Tunai, Departemen Agama RI, Jakarta ,2007.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi Satu, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Hilal Syamsul, *Wakaf dalam Persyarikatan Muhammadiyah*, 2013.

Mardani, *Ayat- ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Cetakan kedua Rajawali Pers, Jakarta 2012.

.M.Athoillah, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak*, Penerbit Yrama Widya, 2014.

M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber bekerjasama dengan PKTTI, UI. Jakarta, 2005.

M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Ciber bekerjasama dengan PKTTI, UI. Jakarta, 2005

Muzarie Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kementrian Agama RI, 2010.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.

Soemitra Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2009.

Salim Zafrullah, *Panduan Wakaf*, Diterbitkan Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

Qahaf Mundzir, *Managemen Wakaf Produktif*, Cetakan Ketiga, KHALIFA, 2007.

Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cetakan Pertama Sinar Grafika Officer, Jakarta 2009.

Wibowo Sukarno, Supriadi Dedi, *Ekonomi Mikro Islam*, Penerbit Pustaka Setia Bandung, 2013.

